



MEDIAKEUANGAN

TRANSPARANSI INFORMASI KEBIJAKAN FISKAL

LANGKAH NEGARA KENDALIKAN NERACA

Neraca transaksi berjalan Indonesia masih mencatatkan nilai defisit. Kebijakan yang mempengaruhi laju ekspor dan impor dilancarkan, guna menekan defisit tetap dalam batas aman. Perbaikan pada sektor industri dan pariwisata Indonesia mutlak diperlukan. Begitupun partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan.

ex.

Daftar Isi



5 DARI LAPANGAN BANTENG

6 EKSPOSUR

LAPORAN UTAMA

- 10 Serba Serbi Neraca Transaksi
- 14 Infografis
- 16 Atur Siasat Atasi Defisit
- 19 Masyarakat Bisa Ikut Seimbangkan Ekspor Impor
- 21 Langkah Pemerintah Atasi Defisit

LAPORAN KHUSUS

- 24 Presiden Jokowi: Internet Harus Diatur dengan Hati-hati
- 25 Menkeu Soroti Isu Kesenjangan Gender di Tempat Kerja
- 26 Survei Ekonomi OECD: Ekonomi Indonesia Sangat Positif
- 27 Indonesia Ajak Dunia Berbagi tentang Pembiayaan Bencana
- 28 Keuangan Syariah Bisa Berperan dalam Pembiayaan Infrastruktur
- 29 Teknologi Adalah Peluang, Bukan Ancaman

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. **Pelindung:** Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. **Pengarah:** Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. **Penanggung Jawab:** Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto. **Pemimpin Umum:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Nufransa Wira Sakti. **Pemimpin Redaksi:** Kabag Manajemen Publikasi, Rahmat Widiana. **Redaktur Pelaksana:** Dianita Suliastuti. **Dewan Redaksi:** Rizwan Pribhakti, Rezha S. Amran, Titi Susanti, Budi Sulistyono, Pilar Wiratoma, Purwo Widiarto, Muchamad Maltazam, Sri Moeji S., Adya Asmara Muda, Hadi Surono, Ali Ridho, Agung Sudaryono, Budi Prayitno, Muchamad Ardani, Indratmo Kurniawan, Diah Sarkorini. **Tim Redaksi:** Irma Kesuma Dewi, Farida Rosadi, Pradany Hayyu, Dwinanda Ardhi, Danik Setyowati, Abdul Aziz, Resha Aditya Pratama, Rostamaji, Adelia Pratiwi, Adik Tejo Waskito, Cahya Setiawan, Arif Nur Rokhman, Maria Cecilia Kinanti, Ferdian Jati Permana, Sugeng Wistriono, Andi Abdurrochim, Shinta Septiana, Ika Dewi Puspitasari, Nur Muhlisin, Aditya Arifiyanto, Intan Nur S., Ardes Martua Yudito S., Emawan Setyo P., Azharuddin Priyotomo. **Redaktur Foto:** Anas Nur Huda, Tino Adi Prabowo, Gathot Subroto, Fransiscus Edy Santoso, Andi Al Hakim, Rhoric Andra F., Muhammad Fath Kathin, Adhi Kurniawan, Nur Iman, Agus Tri Hananto, Langgeng Wahyu Pamungkas, Arief Taufiq Nugroho, Arief Kuswanadji. **Desain Grafis dan Layout:** Arfindo Briyan Santoso, Venggi Obdi Ovisa, Victorianus M.I. Bimo, Dimach Oktaviansyah Karunia Putra. **Alamat Redaksi:** Gedung Djuanda 1 Lantai 9, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328/6330. **E-mail:** mediakeuangan@kemenkeu.go.id.

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepiutannya.

30 Pemerintah Dorong Ekspor Industri Strategis Melalui LPEI

31 Pemerintah Dorong Ekspor Industri Strategis Melalui LPEI

Wawancara

32 Semangat Juang Untuk Hadapi Tantangan Bangsa

POTRET KANTOR

36 KPKNL Surakarta

FIGUR

38 Robert Leonard Marbun, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara

KOLOM EKONOM

40 Fiskalista Sepak Bola

GENERASI EMAS

46 Laboratorium Jadi Sumber Solusi

OPINI

48 Cetak Biru Kerja Sama Bilateral

INSPIRASI

50 Pengajar Yang Tak Lelah Belajar

RENUNGAN

52 Super Mom: Bukan Tuntutan tapi Keyakinan

FILM

53 VENOM: Bukti Film Anti-hero Yang Tetap Disukai!

JALAN-JALAN

54 Relu Antre, Demi Semangkuk Soto

SELEBRITI

56 Sapardi Djoko Damono Membaca Untuk Sastra

MEDIA KEUANGAN adalah majalah resmi Kementerian Keuangan. Memberikan informasi terkini seputar kebijakan fiskal didukung oleh narasumber penting dan kredibel dibidangnya.

MEDIA KEUANGAN saat ini dapat diunduh di Google play dan App store.





GOLDEN WORLD AWARDS
2018

Kementerian Keuangan mendapatkan penghargaan Golden World Awards 2018 kategori "Public Sector" dari International Public Relations Association (IPRA) pada ajang Golden World Awards for Excellent in Public Relations 2018 di Spanyol

Bersatu untuk Rupiah

Di tengah gejolak perang dagang yang digencarkan oleh Amerika yang dipropagandakan untuk membuat America Great Again, Presiden Jokowi menyentak dunia dengan pidatonya di depan sidang pleno Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 di Bali.

Dengan mengambil analogi dalam film seri Game of Thrones, Presiden Jokowi memaknai pertarungan negara elit dunia untuk menjadi nomor satu, malah akan menurunkan perekonomian dunia.

Saat ini, banyak negara berkembang yang mengalami penurunan ekonomi akibat perang dagang dan kebijakan kenaikan suku bunga oleh Bank Sentral AS. Dengan perekonomiannya yang cemerlang, suku bunga yang menaik, dan belanja negara yang ekspansif, membuat Amerika Serikat kembali menjadi daya tarik bagi para investor setelah krisis tahun 2008.

Perekonomian global tengah menuju kepada the *new normal*, sebuah situasi ekuilibrium baru dimana nilai tukar mata uang dunia akan menempati posisi baru. Hampir semua mata uang negara terdepresiasi nilai tukarnya terhadap USD, termasuk Indonesia. Apa yang terjadi?

Sebagai negara berkembang yang tengah melaksanakan pembangunan

infrastruktur secara besar-besaran, Indonesia banyak melakukan kegiatan impor barang bahan baku dan bahan bakar minyak. Hal ini juga diikuti dengan banyaknya impor barang konsumsi sebagai konsekuensi dari semakin meningkatnya golongan menengah di Indonesia.

Sementara itu, ekspor Indonesia masih banyak mengandalkan barang komoditi yang harganya rentan terhadap gejolak ekonomi dunia. Alhasil, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan selama beberapa tahun terakhir. Selama ini, defisit transaksi berjalan Indonesia tersebut dapat dikompensasi oleh surplus dari *capital account*. Namun dengan banyaknya *capital outflow* ke Amerika Serikat, sejak semester dua 2018, defisit tersebut tidak bisa ditalangi lagi. Hal inilah yang menyebabkan nilai rupiah semakin melemah, karena pasokan USD semakin kurang sebagai akibat defisit.

Pemerintah tentu saja tidak tinggal diam, tetapi merespons melalui berbagai kebijakan. Untuk mengurangi impor BBM, pemerintah melaksanakan kebijakan pemakaian 20 persen bahan bakar diesel melalui bahan bakar nabati atau yang dikenal dengan istilah B20. Untuk mengurangi konsumsi, pemerintah menaikkan pajak pada 1.147 jenis produk yang dianggap kurang

produktif guna menurunkan pemakaian barang tersebut.

Untuk meningkatkan pariwisata, yang merupakan ekspor jasa pada *capital account*, pemerintah terus membangun fasilitas kawasan pariwisata di destinasi utama pariwisata. Pemerintah juga terus berusaha meningkatkan ekspor melalui optimalisasi peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dalam pembiayaan dan asuransi ekspor. Semua kebijakan tersebut terus dipantau dan dievaluasi hasilnya. Dari semua kebijakan tersebut, peningkatan ekspor lebih diutamakan daripada melarang atau menurunkan impor.

Pemerintah senantiasa berusaha agar perekonomian Indonesia dapat bertahan di tengah gejolak yang terjadi di dunia. Yang terjadi pada defisit transaksi berjalan adalah pengaruh dari suatu kondisi eksternal yang membuat seluruh dunia terguncang. Segala upaya melalui bauran kebijakan dari sisi makro dan fiskal diharapkan dapat menjadi sabuk pengaman bagi Indonesia. Pemerintah juga akan terus mengevaluasi kebijakan tersebut dan akan terus menyesuaikan diri sehingga dapat mencapai kondisi yang stabil.

Nufransa Wira Sakti,

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
@kemenkeuRI

Ceritakan bentuk dukungan yg telah #temankeu lakukan untuk membantu Pemerintah dalam meningkatkan & menjaga nilai tukar Rupiah. Sertakan tagar #OpiniAnda #MediaKeuangan.

@ilhamadiyaksa (Ilham Putra Adiyaksa)

Membeli produk asli Tanggulangin, Sidoarjo, bagian dari penguatan nilai tukar rupiah, lho! Yuk beli produk lokal kita! Pencerdasan masyarakat juga bisa kita lakukan agar masyarakat tau penyebab dan langkah kongkret yg bisa dilakukan. Biar ngga menelan info yg sembarangan. Ini link yg sudah kami buat <https://youtu.be/50-NzAzM5hs> . Cek yuk!

@NangPhiet (Azzam Mujaddid)

Bentuk langsung melihat rupiah yang terus bergerak melemah saya tukarkan simpanan uang asing sy yg tak seberapa walau saya hnya seorang mahasiswa Di LN dan Belanja serta mengonkumsi Barang DN di Jordan utk bntu meningkatkan Barang ekspor kita.

@edwin_faizal

Cara yang saya tempuh dengan menukarkan tabungan dollar dengan rupiah. Agar tidak tergerus inflasi, rupiahnya diarahkan ke investasi lain seperti emas ataupun reksadana. Lalu menahan diri beli barang elektronik baru apalagi hape baru. Aduh, jangan dulu deh.



The Inspiring Spirit and Energy of Asia

Semangat Asian Games 2018 berlanjut dengan Asian Para Games 2018. Untuk pertama kalinya Indonesia menjadi tuan rumah. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1.7 Triliun untuk menyukseskan pagelaran ini. Pada event yang diselenggarakan pada 6-13 Oktober 2018 ini, Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-5 dengan total raihan medali sebanyak 135 buah (37 emas, 47 perak, dan 51 perunggu).

Foto dan Teks Resha Aditya P.

ESIA 2018



ASIAN PARA GAMES

IN

Parade Budaya Bali untuk Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018

Parade Budaya Bali adalah prosesi karnaval yang menampilkan keragaman, kemegahan, dan keagungan budaya Bali. Parade ini dikemas dalam karya-karya kolosal yang inovatif, menarik, dan dinamis. Untuk menafsirkan dan berpartisipasi dalam memeriahkan Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 di Bali, tema yang diusung yaitu "The Life and Economy of Bali". Melalui tema ini, warga Bali ingin menyampaikan kepada dunia bahwa ritus siklus hidup manusia Bali berkisar dari lahir sampai mati yang selalu disertai dengan naluri untuk memenuhi kehidupan mereka sebagai makhluk ekonomi dan berbudi luhur.



Foto
Agus Tri
Hananto



SERBA SERBI NERACA TRANSAKSI

Isu defisit neraca transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) tengah menjadi perhatian bersama. Terlebih saat besaran defisit pada kuartal kedua 2018 sempat menyentuh ambang batas aman sebesar 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak perlu menunggu lama, pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) menjalankan sejumlah strategi guna memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan. Utamanya, dalam mendorong ekspor dan menekan laju impor yang merupakan komponen paling berpengaruh.

Meski demikian, siaran pers Bank Indonesia (BI) pada pertengahan Oktober lalu memberikan angin segar. Pasalnya, neraca perdagangan pada September 2018 mencatatkan surplus sebesar USD230 juta. Padahal dua bulan sebelumnya, neraca perdagangan mencatatkan defisit sebesar USD940 juta pada Agustus 2018 dan USD2,3 miliar pada Juli 2018. Perbaikan pada neraca perdagangan tersebut diyakini akan berdampak positif dalam memperbaiki kinerja neraca transaksi berjalan ke depan.

Memahami CAD

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara menyampaikan kerangka besar yang membentuk neraca transaksi berjalan. “Ada yang namanya *balance of payment* (BoP) atau neraca pembayaran. Dia (neraca pembayaran) mencatat semua transaksi Indonesia dengan luar negeri,” jelasnya.

Sebagai induk dari segala neraca, neraca pembayaran memuat neraca transaksi berjalan (*current account*) serta neraca transaksi modal dan keuangan (*capital and financial account*). Selanjutnya, di dalam neraca transaksi berjalan kegiatan ekspor impor barang dan jasa yang tercatat dalam neraca perdagangan merupakan komponen terbesar.

“Kalau impornya lebih besar dari pada ekspor, berarti duitnya lebih banyak yang keluar dibandingkan yang masuk. Itu defisit namanya (*current account deficit*). Nah, kalau ekspornya lebih besar daripada impornya, maka artinya *current account* surplus”, ungkap Suahasil.

Indonesia sebagai negara berkembang sudah sewajarnya melakukan impor dalam jumlah banyak. “Ini adalah karakteristik negara berkembang,”

Kegiatan pengolahan produk Ikan Tuna untuk diekspor

Foto
Andi Al Hakim

katanya. Semakin meningkatnya pendapatan suatu negara, maka semakin besar impornya. Pelaku impor tersebut menurutnya, adalah masyarakat sendiri, baik melakukan impor barang konsumsi, maupun barang modal.

Suahasil menyebutkan, dalam melakukan ekspor barang, Indonesia lebih banyak mengekspor barang komoditas, seperti minyak dan batu bara, dibandingkan barang manufaktur. Akibatnya, besarnya penerimaan ekspor bergantung pada harga barang komoditas di luar negeri. “Kalau harganya lagi bagus, penerimaan ekspor kita lebih besar. Kalau harganya jelek, penerimaan ekspor kita turun. Itu juga menentukan besarnya defisit kita,” ungkapnya.

Di samping kegiatan ekspor-impor barang migas dan nonmigas, neraca perdagangan juga mencatatkan ekspor-impor dalam bentuk jasa. Dia mencontohkan, wisatawan mancanegara yang membelanjakan uangnya di Indonesia dianggap sebagai ekspor jasa. Begitupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja dan dibayar di luar negeri merupakan ekspor jasa. Sementara itu, wisatawan asal Indonesia yang berpelesir ke luar negeri dianggap sebagai impor jasa. Begitu pula tenaga asing yang bekerja di Indonesia, maka gaji yang dibayarkan menjadi impor jasa.

“Termasuk juga bila kita kirim barang menggunakan kapal laut. (Perlu dilihat) kapalnya itu milik orang Indonesia atau luar negeri? Jika milik Indonesia itu menjadi ekspor jasa, tapi jika milik luar negeri, (maka) bisa jadi impor, karena kita memakai jasa dari orang luar negeri,” imbuhnya.

Ekonom Bank Permata, Josua Pardede menyampaikan, selama ini Indonesia mengalami defisit untuk neraca transaksi berjalannya. Hal ini diakibatkan oleh besarnya porsi neraca perdagangan dalam neraca transaksi berjalan.

“Rendahnya nilai relatif ekspor terhadap nilai relatif impor disebabkan oleh besarnya permintaan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh penawaran domestik sendiri. Hal ini ditambah dengan produk domestik yang kurang kompetitif di pasar internasional. Besarnya porsi neraca perdagangan dalam transaksi berjalan membuat neraca perdagangan sangat mempengaruhi kondisi CAD Indonesia,” jelasnya.

Josua melanjutkan, meningkatnya defisit transaksi berjalan, khususnya pada kuartal kedua 2018 terutama dipengaruhi oleh geliat perekonomian domestik. Besarnya kegiatan produksi dan investasi di dalam negeri turut berpengaruh pada meningkatnya impor bahan baku dan barang modal. Hal ini selanjutnya menurunkan surplus yang dicapai negara pada sisi perdagangan nonmigas.

Menutup Defisit

Guna menutup defisit yang terjadi pada neraca transaksi berjalan, maka surplus pada neraca transaksi modal (*capital account*) perlu dicapai. Suahasil menjelaskan hal ini lebih jauh,



Pembangunan infrastruktur jangka panjang meningkatkan impor barang modal

Foto
Edy Santoso

“Di neraca pembayaran atau BoP ada komponen kedua, yaitu pencatatan atas transaksi modal yang keluar masuk (*capital account*).”

Istilah *capital inflow* dan *capital outflow* biasa digunakan dalam neraca modal ini. “*Capital outflow* berarti orang Indonesia menukarkan rupiahnya ke dolar, lalu di taruh di luar negeri. Namun, ada juga orang luar negeri yang punya dolar atau valuta asing yang lain, terus dia bawa dolarnya (ke Indonesia) dan ditukarkan ke rupiah. Kemudian, dia beli saham atau obligasi pemerintah di sini. Itu namanya *capital inflow*,” terang Suahasil.

“Kalau yang *capital outflow* lebih besar daripada *capital inflow*, maka kita punya defisit lagi di *capital account*. Tapi kalau *capital inflow*-nya lebih besar daripada *outflow*-nya, berarti kita punya *capital account* surplus.” Diakuinya, Indonesia mencatatkan surplus pada neraca modalnya.

Selama ini, pemerintah terus berupaya agar Indonesia menjadi negara yang menarik bagi investor untuk berinvestasi. Pertumbuhan ekonomi yang baik, stabilitas ekonomi yang terjaga, hingga kepastian hukum menjadi tolok ukur bag investor asing guna menanamkan modalnya di Indonesia.

Kondisi Indonesia

Meski mencatatkan surplus pada neraca modal pada semester pertama 2018, Suahasil menyampaikan, defisit pada neraca transaksi berjalan sebesar USD13,8 miliar, belum bisa tertutupi. Pasalnya, surplus pada neraca transaksi modal hanya mencapai USD6,5 miliar. Padahal dua tahun sebelumnya, yakni 2016 dan 2017, surplus pada neraca transaksi modal mencapai sekitar USD29 miliar. Jumlah ini mampu menutup defisit neraca transaksi berjalan yang pada masa itu hanya sekitar USD17 miliar.

Suahasil mengemukakan turunnya besaran surplus pada semester pertama diakibatkan oleh membaiknya perekonomian Amerika Serikat (AS). “Globalnya itu memang lagi *ngatur* ulang. Karena perekonomian Amerika lagi kinclong banget sekarang. Pertumbuhan ekonominya kinclong, suku bunganya naik,” ungkapnya. Akibatnya, investor luar negeri lebih tertarik menanamkan modalnya ke AS, sehingga aliran modal lebih banyak menuju kesana. Itu juga yang menjadi alasan BI menaikkan tingkat suku bunga guna merespons hal ini.

Defisit yang terjadi, baik pada neraca transaksi berjalan maupun neraca transaksi modal, mengakibatkan permintaan terhadap dolar melebihi ketersediaan dolar yang ditawarkan. Akibat hal ini, mata uang rupiah terdepresiasi.

“Kalau *demand* dolar itu *gede banget*, maka apa yang terjadi? Harga dolarnya akan naik terhadap rupiah, (sedangkan) harga rupiahnya terhadap dolar

akan turun. Itulah yang terjadi sekarang,” jelasnya.

Suahasil menambahkan, guna menghambat penurunan nilai mata uang rupiah lebih jauh, selisih defisit yang terjadi pada neraca pembayaran perlu ditutup. “Ditutupnya dari cadangan devisa,” ungkapnya. Meski demikian, penggunaan cadangan devisa tidak boleh terlalu agresif. Sebab cadangan devisa suatu negara menjadi perhatian para investor sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di negara tersebut.

Sebagaimana diketahui, cadangan devisa berasal dari surplus akibat selisih antara surplus neraca transaksi modal dengan defisit neraca transaksi berjalan. “Pada Februari 2018, cadangan devisa kita mencatatkan nilai tertinggi (hingga) USD132 miliar,” paparnya.

Kebijakan atasi Defisit

Dalam menanggulangi defisit, BI menjalankan kebijakan moneter dengan melakukan penyesuaian pada tingkat suku bunga. Namun, kebijakan ini bersifat jangka pendek. Sementara dalam jangka panjang, pemerintah menjalankan kebijakan struktural diantaranya dengan menggenjot laju ekspor dan menekan laju impor karena keduanya menjadi faktor utama terjadinya defisit.

Guna menekan impor, misalnya, pemerintah menjalankan kebijakan struktural. Salah satunya dengan memberi perhatian lebih pada industri hulu. “Sebab industri hulu menghasilkan output yang digunakan oleh industri-industri berikutnya. Terdapat 17 jenis industri hulu yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tax Holiday. Ketujuh

belas industri tersebut kita kasih insentif fiskal,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga menekan impor migas dengan memberlakukan kebijakan B20 sejak September lalu. Hal ini mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Melalui kebijakan ini, penggunaan bahan bakar solar tidak lagi murni, melainkan dicampur dengan CPO dengan perbandingan 80:20.

Sementara Josua berpendapat, pengurangan impor dalam jangka pendek bisa dilakukan pemerintah melalui kebijakan tarif, kuota, dan pajak untuk barang impor, serta hambatan nontarif lainnya. Saat ini, pemerintah telah memberlakukan kenaikan tarif PPh pasal 22 mengenai Impor untuk 1.147 jenis barang konsumsi. Ini menjadi sinyal pemerintah kepada masyarakat agar menahan kegiatan impornya terhadap barang-barang yang bersifat konsumtif dan menggunakan alternatif produk lokal.

Selain itu, kebijakan tingkat kandungan dalam negeri dirasa cukup efektif diberlakukan. “Pengalaman pada penerapan TKDN telepon genggam dapat dijadikan contoh baik keberhasilan mengurangi laju impor barang konsumsi,” katanya.

Suahasil mengungkapkan kelemahan industri manufaktur saat ini, “Dalam banyak hal, manufaktur kita bergantung pada impor barang modal.” Menurutnya, apabila bahan baku yang digunakan dalam memproduksi barang mencapai 90 persen bahan lokal, maka pelemahan rupiah bisa memiliki dampak positif terhadap peningkatan penerimaan industri. “Itu kalau ekspornya tidak bergantung kepada impor,” katanya.

Hal senada diungkapkan Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Rofyanto Kurniawan. Menurutnya, pelemahan rupiah juga berimplikasi pada semakin murahnya barang-barang Indonesia di pasaran internasional, termasuk biaya perjalanan wisata ke Indonesia. “Hal ini menjadi kesempatan bagi peningkatan jumlah ekspor barang ke luar negeri dan penggalakkan sektor pariwisata,” ungkapnya.

Rofy menambahkan, pembangunan infrastruktur menjadi upaya pemerintah mengembangkan tujuan pariwisata agar diminati wisatawan dalam dan luar negeri. Terkait hal ini, Josua mengingatkan agar masyarakat mengurangi perjalanan wisatanya ke luar negeri. “Hal ini untuk mengurangi impor jasa,” pesannya.

Teks Farida Rosadi

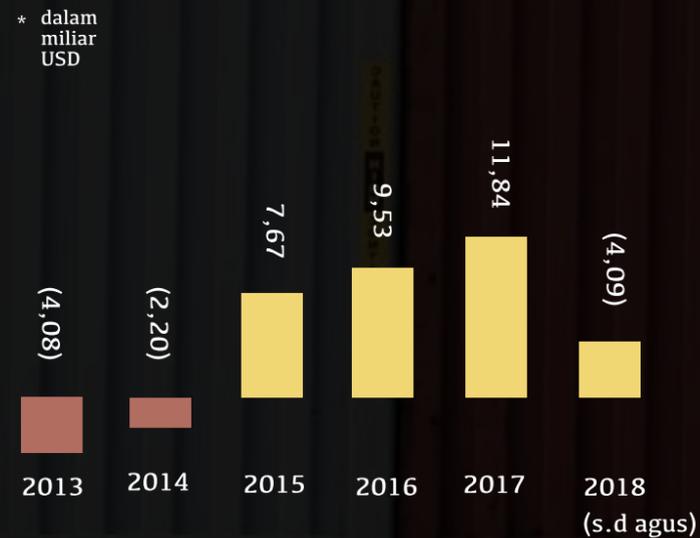
NERACA PERDAGANGAN DAN TRANSAKSI BERJALAN INDONESIA

Indonesia memiliki total impor yang lebih besar dibandingkan total ekspor atau disebut juga dengan kondisi current account deficit. Artinya, uang yang keluar lebih besar dibandingkan mata uang negara lain yang masuk. Akibatnya, Indonesia mengalami defisit transaksi berjalan selama beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) neraca perdagangan periode Januari-Juli, terjadi defisit USD3,09. Meningkatnya impor barang yang lebih besar dibanding ekspor membuat neraca perdagangan nasional mencatat defisit. Untuk transaksi berjalan, Indonesia mengalami defisit sebesar USD13,75 miliar sepanjang semester I tahun 2018

NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

(Defisit)
Surplus



DEFISIT NERACA PERDAGANGAN YANG JUGA DIALAMI NEGARA LAIN SELAMA TAHUN 2018 (S.D. AGUSTUS)

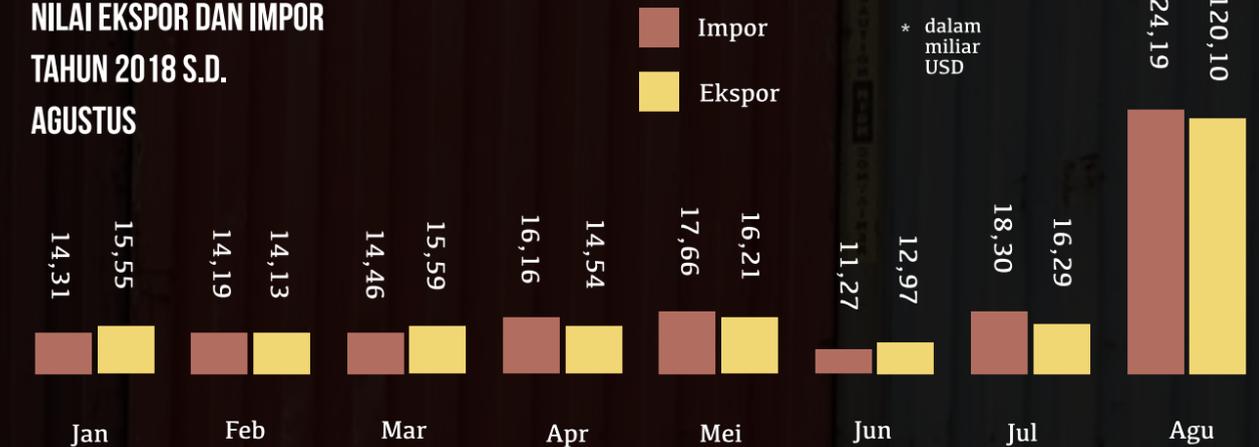


STRATEGI PENGURANGAN DEFISIT NERACA PERDAGANGAN

- Pemberian insentif bagi industri berorientasi ekspor
- Kemudahan legalitas terhadap Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) sebagai bentuk upaya peningkatan daya saing ekspor kayu di Indonesia
- Optimalisasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap beberapa proyek infrastruktur yang sedang berjalan maupun yang akan dilakukan.
- Pengurangan impor BBM solar melalui substitusi mandatory penggunaan Biodiesel 20 (B20).
- Pengendalian impor barang konsumsi yang berfokus kepada rencana kenaikan PPh Pasal 22.
- Percepatan pengembangan dan penyebaran industri di luar Pulau Jawa.

Sumber:
Kementerian Perdagangan
United Cencus Bureu
Office for National Statistics UK
tradingeconomics.com
Kementerian Perindustrian

NILAI EKSPOR DAN IMPOR TAHUN 2018 S.D. AGUSTUS



ATUR SIASAT ATASI DEFISIT

Beberapa waktu lalu masyarakat Indonesia cukup dibuat heboh dengan pelemahan nilai tukar Rupiah. Depresiasi yang terjadi tersebut berasal dari dinamika ekonomi global yang salah satunya berasal dari kebijakan kenaikan suku bunga The Fed Amerika Serikat. Imbas ini tak hanya mengenai negara berkembang saja, namun juga ke hampir semua negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang pun juga terkena dampaknya.

Salah satu mesin pertumbuhan ekonomi yang terkena imbas secara langsung antara lain adalah sektor ekspor impor. Nilai impor barang dan jasa yang lebih besar dari nilai ekspornya menyebabkan kondisi yang disebut defisit neraca transaksi berjalan atau *current account deficit* (CAD). Namun demikian, Indonesia masih dianggap mampu bertahan lantaran memiliki fundamental ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan negara berkembang lainnya.

Diwawancarai Media Keuangan beberapa waktu lalu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahazil Nazara, memaparkan di

samping neraca transaksi modal dan finansial (*capital and financial account*), neraca transaksi berjalan (*current account*) merupakan salah satu unsur pembentuk neraca pembayaran (*balance of payment*) dari suatu negara secara agregat. Dalam posisi tersebut, tren tiga tahun terakhir posisi saldo neraca pembayaran Indonesia sebenarnya memiliki saldo yang positif. Namun demikian, kekhawatiran atas laporan defisit neraca transaksi berjalan semester pertama 2018 cukup memberi kontribusi terhadap sentimen depresiasi mata uang Garuda.

“Kalau terjadi defisit seperti *current account* dengan *capital account* itu, kira-kira *demand for dollar* dengan *supply of dollar* lebih besar mana? Lebih besar *demand*-nya kan. Kalau *demand* dolar itu besar maka apa yang terjadi terhadap harga dolar? Harga dolarnya akan naik terhadap rupiah, harga rupiahnya terhadap dolar akan turun. Itulah yang terjadi sekarang. Jadi, itu sebetulnya fenomena ekonomi,” jelasnya.

Senada dengan Suahazil, ekonom Bank Permata, Josua Pardede, mengemukakan defisit neraca transaksi berjalan yang

berkelanjutan akan menyebabkan terjadinya depresiasi nilai tukar domestik. Depresiasi nilai tukar ini akan berdampak positif bagi ekspor suatu negara karena harga produk domestik yang diekspor ke pasar internasional akan menjadi lebih kompetitif sehingga permintaannya naik. Menurutnya, hal tersebut tentunya akan sangat menguntungkan bagi sektor primer seperti pertambangan, pertanian, dan perkebunan.

Sementara itu, di sisi lain depresiasi nilai tukar domestik menyebabkan meningkatnya harga impor relatif, hal ini tentu akan merugikan sektor manufaktur. Menurut Josua, Indonesia masih memiliki tantangan sendiri dalam membangun konektivitas industri hulu ke hilir.

“Sejumlah manufaktur termasuk sebagian yang berorientasi ekspor masih mengandalkan impor bahan baku. Apabila nilai mata uang terdepresiasi, maka biaya produksi akan meningkat dan harus diantisipasi dengan kenaikan harga atau pemangkasan margin profit,” paparnya.

Mengendalikan CAD

Dalam mengatasi depresiasi



rupiah akibat defisit neraca transaksi berjalan, Suahazil menjelaskan pentingnya keterlibatan Bank Indonesia (BI) untuk melakukan kebijakan moneter sebagai kebijakan jangka pendek. Instrumen kebijakan yang bisa digunakan salah satunya melalui kebijakan suku bunga acuan.

Hal itu menjadi penting terutama dalam menanggapi kebijakan The Fed yang pada akhir September lalu menaikkan suku bunga kedua kalinya dalam tahun ini. Untuk menjaga ekspektasi pasar domestik, BI selaku otoritas moneter perlu mengatur suku bunganya melalui *7-day repo rate*. “Kebijakan suku bunga tersebut sebagai bagian dari kebijakan moneter ditentukan secara independen oleh BI. Independen dari pemerintah,” ungkapnya.

Dalam jangka panjang, struktur perekonomian dalam negeri juga perlu untuk diperbaiki. Inilah yang menjadi tugas utama pemerintah dalam membuat kebijakan struktural ekonomi. Menurut Suahazil, berkaca dari sumber masalah defisit neraca transaksi berjalan, pemerintah perlu melakukan beberapa kebijakan struktural yang dapat mengendalikan impor

dan meningkatkan ekspor.

Mengonfirmasi hal tersebut, Kepala Pusat Kebijakan Penerimaan Negara (PKPN), Rofyanto Kurniawan, mengemukakan Pemerintah telah menyiapkan berbagai insentif di bidang perpajakan guna mendorong perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Secara garis besar, kebijakan tersebut dibagi menjadi dua, yaitu kebijakan insentif sektoral dan kebijakan insentif kawasan (spasial).

Insentif sektoral bertujuan mendorong tumbuhnya sektor-sektor yang menjadi prioritas pemerintah, misalnya Tax Holiday, Tax Allowance, dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP). Sementara insentif yang bersifat kawasan bertujuan mengembangkan daerah-daerah tertentu, baik dalam

rangka aglomerasi ekonomi maupun pemerataan perekonomian. Contoh insentif yang bersifat kawasan adalah insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 104 tahun 2016, dan insentif untuk Kawasan Industri yang diatur dengan PMK 105 tahun 2016.

Rofy turut menjelaskan dalam tahun 2016-2017, defisit transaksi berjalan mencapai sekitar USD17 miliar. Defisit tersebut mampu diimbangi oleh surplus neraca transaksi modal dan finansial pada kisaran USD29 miliar.

Sementara itu, selama semester I tahun 2018, defisit transaksi berjalan telah mencapai USD13,7 miliar. Meskipun kinerja ekspor

Aktivitas ekspor impor di pelabuhan Tanjung Priok.

Foto Anas Nur Huda

barang mencapai USD88,2 miliar, tetapi diikuti juga dengan impor yang cukup tinggi mencapai USD85,6 miliar sehingga terjadi penurunan surplus neraca perdagangan. Selain itu, surplus neraca transaksi modal dan finansial semester I 2018 hanya mencapai USD6,5 miliar. Diperkirakan hingga akhir tahun hanya mencapai USD13 miliar.

Mengendalikan impor

Untuk membangun struktur ekonomi yang kuat di masa mendatang, diperlukan perbaikan sektor industri hulu. Hal ini menjadi penting karena hasil dari industri hulu tersebutlah yang akan menjadi modal untuk digunakan pada industri selanjutnya. Harapannya, dengan semakin banyak industri hulu yang dibangun di Indonesia akan mengurangi impor barang-barang modal yang komposisinya masih terhitung besar.

Merespons hal tersebut, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan kebijakan fiskal melalui penyesuaian tarif PPh Impor atas 1.147 komoditas dalam rangka mengendalikan impor. Menurut Rofy, dalam menentukan 1.147 kode HS yang dilakukan penyesuaian PPh impor, Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan pembina sektor dalam hal ini Kementerian Perindustrian.

“Secara umum barang yang dikenai penyesuaian PPh impor adalah barang-barang yang termasuk dalam kriteria barang konsumsi, bukan merupakan bahan baku atau barang modal, terdapat barang produksi dalam negeri sebagai substitusi impor, serta barang tersebut relatif tidak berpengaruh terhadap inflasi,” jelas Rofy.

Penyesuaian tarif untuk 1.147 item tersebut terbagi menjadi 210 item tarif PPh 22 yang naik dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam kategori ini adalah barang mewah seperti mobil CBU, motor besar, dan laptop. Kedua, adalah 218 item komoditas dengan tarif PPh 22 yang naik dari 2,5 persen menjadi 10 persen. Termasuk dalam item ini adalah seluruh barang konsumsi yang sebagian besar telah dapat diproduksi di dalam negeri. Misalnya barang elektronik (dispenser air, pendingin ruangan, lampu), keperluan sehari-hari seperti sabun, sampo, dan kosmetik, serta peralatan masak/dapur.

Terakhir, 719 item komoditas dengan tarif PPh 22 yang naik dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen untuk seluruh barang yang digunakan dalam proses konsumsi dan keperluan lainnya. Contohnya produk makanan minuman olahan (cokelat, kopi, teh), bahan bangunan seperti keramik, peralatan elektronik audio-visual seperti kabel, *box speaker*, produk tekstil seperti *overcoat*, *polo shirt*, *swim wear*.

Mendongkrak ekspor

Selain PMK 131 tahun 2018, untuk mendorong industri, investasi dan ekspor, Menkeu juga menetapkan PMK 130 tahun 2018 tentang Kawasan Berikat. Peraturan ini dibentuk untuk mengatur antara lain kemudahan operasional pemasukan dan pengeluaran barang dengan memangkas 45 perizinan menjadi hanya 3 perizinan, proses pengurusan perizinan dilakukan secara *online*, kemudahan pelaksanaan subkontrak yang memungkinkan ekspor langsung dari Kawasan Berikat penerima

subkontrak, dan pendelegasian wewenang pemberian perizinan dari kantor pusat ke unit vertikal. Aturan ini berlaku di seluruh kawasan berikat dan akan mempengaruhi 1.372 Kawasan Berikat.

Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) selama ini telah memberikan beberapa kontribusi positif bagi perekonomian Indonesia, antara lain rasio ekspor terhadap impor sebesar 3,04 kali, kontribusi ekspor terhadap ekspor nasional sebesar USD54,82 miliar atau 37,76 persen, penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 2,1 juta orang, nilai investasi perusahaan sebesar Rp168 triliun, kontribusi terhadap penerimaan negara berupa pajak pusat Rp64,94 triliun dan pajak daerah Rp8,7 triliun, serta jumlah jaringan usaha sebanyak 92.881 jaringan usaha.

Selain insentif fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga terus meningkatkan layanan kemudahan berusaha dengan cara melakukan simplifikasi persyaratan untuk mendapatkan fasilitas Kawasan Berikat dan KITE serta memperoleh Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), dan dalam melakukan registrasi kepabeanaan. DJBC juga telah menggagas perizinan *online* terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS). Upaya yang dilakukan oleh DJBC tersebut diharapkan makin mendorong peningkatan ekspor nasional.

Kepala BKF Suahazil menambahkan depresiasi Rupiah meski menekan importir namun di sisi lain menguntungkan eksportir. Meski demikian, hal itu tidak akan memberi dampak apabila kandungan konten lokal dari barang ekspor masih banyak tergantung dari barang impor. “Kalau pengusaha domestik konten lokalnya tinggi, dia akan merasakan dampak positif dari pelemahan rupiah. Tetapi kalau *local content*-nya kecil, dia tergantung kepada impor, maka dampak pelemahan rupiah akan membuat dia menjadi lebih mahal,” jelasnya.

Namun demikian, berbagai macam usaha pemerintah dalam menstabilkan CAD dan menjaga Rupiah sedikit memberikan harapan cerah. Tercatat, dalam rilis keterangan pers Badan Pusat Statistik hari Senin (15/10) lalu melaporkan bahwa neraca perdagangan bulan September 2018 terpantau surplus sebesar USD230 juta. Hal itu mengindikasikan adanya optimisme perbaikan neraca transaksi berjalan untuk kuartal ketiga tahun ini.

Teks Abdul Aziz



MASYARAKAT BISA IKUT SEIMBANGKAN EKSPOR IMPOR

Neraca transaksi berjalan adalah alat untuk mengukur perdagangan internasional. Neraca ini mencakup transaksi impor dan ekspor barang, jasa, pendapatan faktor produksi dari aset dan tenaga kerja, serta transfer uang. Sebab itu, jika terjadi defisit transaksi berjalan, berarti Indonesia menjadi peminjam dari negara-negara lain di dunia dan karenanya membutuhkan aliran modal untuk membiayai defisit ini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengatakan, defisit transaksi berjalan tidak selalu berarti buruk. Defisit ini bisa menjadi hal yang positif apabila digunakan untuk tujuan-tujuan produktif. Misalnya saja seperti pembangunan industri atau infrastruktur yang akan menghasilkan pendapatan

di masa yang akan datang. Namun, jika defisit hanya digunakan untuk konsumsi, maka bisa terjadi ketidakseimbangan karena defisit ini tidak akan menghasilkan pendapatan.

Dijelaskan Suahasil lebih lanjut, sebenarnya masyarakat bisa turut membantu menyeimbangkan nilai ekspor dan impor Indonesia. Cara yang paling mudah adalah dengan memperbanyak penggunaan barang buatan dalam negeri. “Kalau bicara impor, bukan berarti pemerintah saja yang impor, tetapi kita semua. Baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat umum,” ujarnya.

Kepala Subbidang Transaksi Berjalan, Abdul Aziz mengatakan jika pemerintah ingin masyarakat lebih berperan dalam membantu menyeimbangkan neraca

Peningkatan produksi dalam negeri diharapkan mengurangi kebutuhan impor.

Foto
Anas Nur Huda

Meski kampanye untuk menggunakan produksi dalam sudah berlangsung cukup massif dan lama, namun kerap kali muncul pertanyaan produk dalam negeri apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan barang impor.

transaksi berjalan, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyamakan pemahaman dan memberikan informasi yang jelas mengapa nilai impor Indonesia saat ini lebih besar dari nilai ekspor. Dengan begitu, pelaku impor dan ekspor bisa turut memberikan aspirasinya terkait kebijakan pemerintah dalam mengatasi hal ini, misalnya dengan mendorong penggunaan bahan bakar biodiesel (B20) dan pengenaan PPh 22 untuk barang konsumsi dan barang mewah impor.

Hal lain yang juga perlu diperhatikan, kata Azis, adalah demografi penduduk kita terutama generasi milenial. Generasi ini memiliki kecenderungan lebih untuk mengonsumsi barang impor sebagai bagian dari gaya hidup. Ada suatu kebanggaan jika mengenakan barang-barang bermerk dari luar negeri atau jika berliburan ke luar negeri. Artinya generasi ini bisa berperan besar untuk membantu menekan defisit.

Meski kampanye untuk menggunakan produksi dalam sudah berlangsung cukup massif dan lama, namun kerap kali muncul pertanyaan produk dalam negeri apa yang bisa kita gunakan untuk menggantikan barang impor. Hingga saat ini calon pembeli masih kesulitan untuk menjangkaunya dan penjual kesulitan memasarkannya.

“Untungnya, saat ini sudah tersedia banyak *marketplace online* yang lebih memudahkan. Upaya ini bisa menjadi pilihan, meski belum bisa dinilai sejauh mana akan membantu defisit neraca perdagangan,” kata Azis. Begitu pula dengan penerapan kebijakan penggunaan B20. Meski belum bisa diklaim efektif membantu menekan defisit, namun paling tidak saat ini volume impor solar sudah mulai menurun.

Hal lain yang bisa dilakukan menurut Azis adalah dengan menunda perjalanan ke luar negeri. Pada neraca transaksi berjalan, terdapat neraca ekspor impor jasa. Misalnya jasa perjalanan, serta jasa transportasi penumpang dan barang, seperti maskapai penerbangan. “Kita bisa mulai dari pegawai pemerintahan dulu. Saya senang pertemuan tahunan IMF-WBG 2018 bisa dilaksanakan di Bali. Artinya delegasi kita tidak perlu pergi ke luar negeri,” ujar Azis.

Namun di sisi lain, banyak juga orang yang melakukan perjalanan ke luar negeri untuk berlibur. Artinya, pemerintah perlu menyediakan alternatif destinasi liburan baru di dalam negeri yang tidak

kalah menarik. “Dulu ada wacana akan dibangun studio Disney di Yogyakarta, namun infrastruktur bandaranya belum memadai. Ini perlu diperbaiki sehingga bisa menarik investor,” katanya.

Satu hal lain yang paling mudah untuk dilakukan masyarakat adalah beralih ke transportasi massal untuk menghemat energi. “Kurangi penggunaan kendaraan pribadi. Kalau kita semua berpindah ke transportasi publik, impor bahan bakar akan bisa kita kurangi,” katanya. Sebagai pembanding, di berbagai negara maju seperti Jepang, izin untuk memiliki kendaraan bermotor cukup ketat. Selain itu, biayanya cukup tinggi, baik dari sisi harga bahan bakar maupun biaya parkir. Kebijakan seperti ini dengan sendirinya mendorong masyarakat untuk menggunakan angkutan umum.

Pada neraca transaksi berjalan juga terdapat komponen pendapatan sekunder yang sebenarnya adalah *remittance* atau pengiriman uang para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Menurut Azis, sebenarnya *remittance* ini tercatat surplus, namun Indonesia lebih banyak mengirimkan tenaga yang tidak terampil atau pekerja kasar. Jika para TKI mau mengikuti pelatihan terlebih dahulu yang difasilitasi BNP2TKI sebelum berangkat, tentu penghasilan TKI bisa menjadi lebih besar dan bisa membantu neraca pendapatan.

Selain itu, usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) memiliki potensi besar untuk ekspor. Azis mencontohkan, saat Indonesia mengekspor gerbong kereta api ke Bangladesh tahun 2016, sebetulnya ada banyak UMKM yang terlibat. Misalnya dari penyiapan kursinya atau lampunya. “Artinya, UMKM banyak membantu mendorong ekspor. Hanya saja mereka tidak berada di ujung industrinya. Mereka hanya memasok untuk keperluan industri besarnya,” jelas Azis.

Namun, bukan berarti UMKM tidak bisa melakukan kegiatan ekspor sendiri. Menurut Azis, saat ini tinggal bagaimana pemerintah membantu UMKM agar lebih maju. Misalnya melalui skema pembiayaan dan regulasi yang memfasilitasi mereka untuk mampu menembus pasar baru. “Menkeu sudah beberapa kali memberikan tantangan kepada LPEI untuk mengakomodasi lebih banyak UMKM karena memang potensinya besar,” ujarnya.

Teks Irma Kesuma



Suahasil Nazara, Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Foto Resha Aditya Pratama

Langkah Pemerintah Atasi Defisit

Data dari BPS menyebutkan defisit neraca transaksi berjalan semester I 2018 sudah hampir mencapai angka defisit selama setahun 2017. Hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk kembali menyeimbangkan angka defisit. Untuk mengetahui lebih lanjut langkah pemerintah dalam mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan, simak wawancara Media Keuangan dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara, berikut ini.

Apa itu neraca transaksi berjalan? Mengapa bisa terjadi defisit pada neraca transaksi berjalan?

Ada yang namanya *balance of payment* atau neraca pembayaran. Neraca pembayaran ini mencatat semua transaksi Indonesia dengan luar negeri. *Balance of payment* terdiri atas 3 bagian besar. Pertama, adalah yang namanya *current account* atau bahasa Indonesianya neraca transaksi berjalan. *Current account* mencatat seluruh transaksi ekspor dan impor. Kalau impor berarti kita bayar, ada uang keluar dari Indonesia. Kalau kita ekspor, berarti kita jual barang, ada uang masuk ke Indonesia.

Kalau impornya lebih besar daripada ekspor, berarti lebih banyak uang yang keluar dibandingkan uang yang masuk. Kondisi itu yang dinamakan defisit. Jadi kalau kita bilang defisit, itu adalah karena impornya lebih besar dibandingkan ekspornya. Nah kalau ekspornya lebih besar daripada impornya, maka jadi surplus, atau *current account surplus*.

Tapi di neraca pembayaran ada komponen kedua, yaitu pencatatan atas transaksi modal yang keluar masuk. Ada orang yang memasukkan uang ke Indonesia, beli produk produk sektor keuangan, beli saham, beli obligasi, atau sebaliknya. Semua aktivitas itu dicatat di *capital account*. Disebut *capital outflow* apabila uang

orang Indonesia ditaruh di luar negeri, jika sebaliknya namanya *capital inflow*. Kalau yang *outflow* lebih besar daripada yang *inflow* maka kita punya defisit lagi di *capital account*. Tapi kalau *inflow* nya lebih besar daripada *outflow* nya berarti kita punya *capital account* surplus.

Bagaimana kondisi defisit neraca transaksi berjalan Indonesia?

Indonesia di mana, Indonesia itu berada di kondisi defisit ya. Artinya, yang kita impor lebih besar dibandingkan yang kita bisa ekspor, baik barang maupun jasa. Impor lebih banyak adalah karakteristik dari negara yang berkembang. Kalau pendapatan lagi naik, kita cenderung ingin beli baju, sepatu, dan barang impor. Yang ngimpor siapa, ya kita-kita.

Pada 2016 dan 2017 defisitnya sebesar USD17 miliar dan USD17,3 miliar. Semester I 2018 agak beda, baru setengah tahun sudah mencapai USD13,8 miliar. Sehingga kita berpikir, mungkin jika diproyeksikan setahun ini akan udah pasti lebih besar daripada USD17 miliar ya.

Namun jika kita lihat di *capital account* Indonesia gimana? Indonesia biasanya surplus. Pada 2016 dan 2017 sama sebesar USD29 miliar, pada semester I 2018 USD6,5 miliar. Sehingga jika dibandingkan *current account* defisit (gap-nya) ketutup. Defisitnya di *current account*, tapi surplusnya di *capital account*. Ketutup kan.

Seperti apa langkah pemerintah guna mengendalikan defisit neraca transaksi berjalan?

Dalam jangka pendek digunakan dalam jangka pendek adalah kebijakan moneter, yaitu kebijakan Bank Indonesia (BI), terutama mengenai suku bunga. Dalam jangka pendek, BI harus mengatur suku bunga, sehingga uang orang yang diinvest ke kita tidak boleh berada di bawah ekspektasi pasar. Karena suku bunga Amerika besarnya jelas.

Dalam jangka panjang, kita juga harus membereskan perekonomian. *Current account* defisit terjadi karena kita lebih banyak impor dibandingkan ekspor. Sekarang bagaimana caranya menurunkan impor atau menaikkan ekspor. Dua-duanya harus kita pikirkan. Tetapi tidak instan. Impor kita yang paling besar berasal dari impor bahan baku.

Sehingga, yang harus kita atasi paling pertama adalah industri hulu (*upstream*). Karena industri hulu menghasilkan output yang akan digunakan di industri berikutnya. Ada 17 jenis industri hulu yang diberi

insentif fiskal. Apabila membangun di Indonesia akan dibebaskan dari PPh badan. Jika investasi Rp30 triliun bisa dibebaskan PPh Badan 20 tahun, sehingga *output*nya bisa dijual lebih murah dan digunakan oleh industri dalam negeri lagi.

Salah satu kebijakan yang dilakukan guna mengurangi defisit neraca transaksi berjalan adalah penerapan bahan bakar B20. Sejauh mana hal ini bisa mengendalikan defisit?

B20 artinya, 20 persen volume solar kita itu berasal dari CPO, kelapa sawit. Pertama, CPO bisa tumbuh lagi, berbuah lagi, tumbuh lagi, berbuah lagi. Beda sama *fossil fuel* yang sekali diambil langsung habis. Jadi, CPO itu *renewable energy*. Setelah digunakan, pohon kelapa sawit dipupuk lagi, dan akan berbuah lagi. *Renewable*, bisa diperbaharui. Kedua, Indonesia itu produsen CPO yang luar biasa besar. Jadi daripada kita impor, kita pakai aja produksi dalam negeri. Sehingga, dapat mengurangi *current account deficit*.

Program lain yang ditempuh pemerintah adalah menggenjot ekspor. Seperti apa pelaksanaannya?

Pertama, kita kenali masalahnya dulu. Masalah utamanya adalah barang yang akan kita ekspor itu barang komoditas ya. Tapi *kan* sebenarnya kita pengen ekspor barang manufaktur juga. Kalau manufaktur diproses, berarti ada labornya. Kalau barang komoditas itu ibarat cuma *nyerok* lalu dibawa ke luar negeri. Nah, kalau kita membuat manufakturnya, akan ada aktivitas impor mesin dan bahan baku dulu.

Sehingga ekspor yang sifatnya manufaktur seperti ini akan sulit bikin ekspor. Kenapa? Waktu beli mesin dan beli barang bahan baku,

harus dibayar dengan rupiah yang lebih lemah. Tapi misalkan bahan bakunya dan barang modal tersedia dalam negeri, maka jika rupiah melemah, ekspor bisa naik ya. Kalau rupiah melemah, ekspor itu harusnya lebih kompetitif.

Hal-hal apa saja yang bisa masyarakat lakukan untuk berkontribusi dalam mengurangi defisit neraca transaksi berjalan?

Pakai barang dalam negeri, kurangi semangat impor. Jadi, kalau kita bilang impor itu bukan berarti Pemerintah yang impor. Kita semua. Ya Pemerintah, ya masyarakat, ya dunia usaha, Pemerintah impor nggak? Kalau mau bangun infrastruktur, sebagian besar komponennya impor. Mau bangun pembangkit listrik, ya itu impornya tinggi.

Melalui sejumlah kebijakan yang dilakukan pemerintah, berapa besar target penurunan defisit neraca transaksi berjalan yang diharapkan terjadi di akhir tahun 2018 ini?

Defisit *current account* itu tidak ada target angka tertentu. Hanya saja, sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki struktur ekonomi yang masih bergantung pada negara maju. Biasanya defisit sekitar 2 persen dari PDB bisa diterima, 2,5 persen masih bisa diterima. Tapi kalau sudah mencapai 3 persen, artinya tidak boleh dianggap biasa-biasa saja. Sehingga, harus ada langkah-langkah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah berkoordinasi sangat erat dengan Bank Indonesia.

Teks Dianita Suliastuti

Pertemuan Tahunan IMF-WBG 2018 untuk Kepentingan Nasional

Pertemuan tahunan lembaga moneter internasional dan grup bank dunia (Annual Meetings IMF-WBG) 2018 baru saja selesai dilaksanakan. Pertemuan yang berlangsung pada 8-14 Oktober di Nusa Dua, Bali tersebut dihadiri oleh sekitar 35 ribu orang peserta, termasuk 3500 delegasi dari 189 negara.

Agenda utama pertemuan ini adalah mendiskusikan tantangan ekonomi dan perkembangan global, termasuk pengentasan kemiskinan. Semua isu yang dibahas sangat relevan dengan agenda dan kepentingan nasional, di antaranya isu investasi pada modal manusia, ekonomi digital, dan keuangan syariah. Berikut beberapa poin penting dari rangkaian sidang tahunan ini yang bisa dimanfaatkan Indonesia untuk menciptakan ekonomi inklusif bagi seluruh masyarakat.

Presiden Jokowi: Internet Harus Diatur dengan Hati-hati

Presiden Joko Widodo meminta dunia agar membuat regulasi mengenai internet dengan hati-hati dan memperhatikan kepentingan konsumen. Presiden mengungkapkan hal tersebut dalam sambutan pembukaan seminar The Bali Fintech Agenda di Nusa Dua, Bali. Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Menkeu), Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde, Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim, dan Gubernur Bank Sentral Inggris tampil sebagai pembicara.

“Kita tidak boleh terburu-buru meregulasi ini tapi biarkan inovasi ini tumbuh terlebih dahulu. Kita harus menyikapi gelombang inovasi dengan aturan yang ringan dan *save harbour*,” ujar Presiden Jokowi. Presiden juga melihat apabila regulasi terlalu ketat dan menciptakan sistem yang tertutup, akan menyebabkan kegiatan ekonomi menjauh dari ekonomi siber. “Kita harus mendorong terciptanya standar dan keterbukaan global,” kata Presiden Joko Widodo.

Menkeu mengatakan perkembangan pesat di sektor teknologi keuangan tidak menciptakan disrupsi yang mengganggu ekonomi dan tatanan sosial. “*Bali Fintech Agenda* akan membantu negara di dunia membuat kerangka kebijakan agar teknologi keuangan dapat melindungi konsumen dan tidak mengancam stabilitas keuangan,” jelas Menkeu. Ditambahkan juga oleh Menkeu bahwa 12 elemen dalam *Bali Fintech Agenda* akan membantu negara menciptakan dampak positif pada perekonomian dunia dengan panduan yang dikeluarkan IMF bersama-sama Bank Dunia itu.

Bali Fintech Agenda yang diluncurkan oleh IMF bersama dengan Bank Dunia berisi 12 elemen. Elemen itu adalah : (i) mendukung perkembangan *fintech*, (ii) memanfaatkan teknologi baru untuk meningkatkan pelayanan jasa keuangan, (iii) mendorong kompetisi serta berkomitmen kepada pasar yang terbuka, bebas dan teruji, (iv) perlunya inklusi keuangan untuk semua orang dan mengembangkan pasar keuangan, (v) memantau perkembangan perubahan di sistem finansial, (vi) menyesuaikan kerangka kebijakan dan praktek pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan stabilitas sistem keuangan, (vii) melindungi integritas sistem keuangan, (viii) menyesuaikan kerangka hukum agar sesuai dengan perkembangan terkini, (ix) memastikan stabilitas moneter dan sistem keuangan domestik, (x) mengembangkan sistem infrastruktur finansial dan data yang kuat guna memperoleh manfaat yang berkelanjutan dari *fintech*, (xi) mendorong kerjasama informasi internasional, serta (xii) meningkatkan pengawasan bersama oleh sistem moneter dan keuangan internasional.

Teks
Biro KLI

Foto
Agus Tri
Hananto



Menkeu Soroti Isu Kesetaraan Gender di Tempat Kerja

Menkeu memaparkan, kontribusi perempuan memberi manfaat baik untuk keluarga, ekonomi, dan masyarakat. Di Indonesia, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja, tetapi masih ada pandangan patrialisme di masyarakat. Wanita masih dinilai sebagai sumber kedua pencari penghasilan bagi keluarga.

Banyak perempuan muda yang sangat semangat saat mulai bekerja. Tetapi kemudian harus berhenti bekerja saat mulai menikah, hamil, dan melahirkan. Mengurus rumah tangga dipandang sebagai tugas utama perempuan. Mereka harus membawa peran sebagai seorang Ibu. Pekerjaan domestik rumah tangga dibebankan kepada perempuan.

“Di institusi kami, Kementerian Keuangan, kami telah menjadi *best practice* dan mendapatkan penghargaan, karena kami telah menyediakan berbagai fasilitas untuk pekerja perempuan, misalnya ruang menyusui dan tempat penitipan anak. Dengan demikian, kita membantu mengurangi beban perasaan pada pekerja perempuan,” ujar Menkeu dalam diskusi panel *Empowering Women in the Workplace* pada rangkaian acara IMF-WBG Annual Meetings 2018, Selasa (09/10) di Bali International Convention Centre, Westin, Nusa Dua, Bali.

Diskusi panel ini diselenggarakan untuk menyoroti ketidakadilan *gender* yang telah mengakibatkan terhambatnya potensi pembangunan negara, ekonomi, dan perusahaan-perusahaan dalam menghadapi tantangan dewasa ini.

Sehingga menurut Menkeu, alangkah baiknya jika suatu institusi menjadikan lingkungan kantornya ramah bagi wanita. Agar para wanita dapat bekerja dengan nyaman dan dapat

menunjukkan seluruh potensi yang ia miliki.

“Tanpa adanya bantuan dari kebijakan yang dapat meringankan beban para wanita, maka menggaungkan kesetaraan *gender* dalam angkatan kerja akan menjadi sangat sulit,” kata Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Pembicara lain, Managing Director IMF, Christine Lagarde, menyoroti bahwa saat ini kita sedang menghadapi era teknologi tinggi (*high-tech*) yang tentu akan berpengaruh cukup besar terhadap keberadaan perempuan dalam dunia kerja. Efek ini bukan karena perempuan bersifat minoritas, akan tetapi karena mereka bekerja dalam bidang pekerjaan yang dapat diotomatisasi. Sehingga, teknologi mampu menimbulkan risiko besar terhadap jumlah pekerjaan yang diisi oleh perempuan.

Senada dengan Lagarde, Executive Secretary UN Economic Commission for Africa, Vera Songwe, menceritakan bahwa mereka meningkatkan akses wanita di Tanzania terhadap listrik, dan membuat tingkat tenaga kerja wanita menjadi naik. Menurutnya, wanita membutuhkan akses terhadap pembiayaan, teknologi, dan jasa.

Teks
Biro KLI

Foto
Langgeng
Wahyu P.



Survei Ekonomi OECD: Ekonomi Indonesia Sangat Positif

Teks
Biro KLI

Foto
Agus Tri
Hananto

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa hal yang patut diperhatikan dalam hasil survei ekonomi Indonesia oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) 2018 adalah keadaan ekonomi Indonesia menunjukkan hasil pertumbuhan positif meski sedang mengalami tekanan penurunan ekonomi global.

Hal ini disampaikan saat peluncuran OECD Economic Survey Indonesia 2018 di Sofitel Hotel Nusa Dua, Bali (10/10) dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. Sekretaris Jenderal OECD, Angel Gurría memaparkan hasil survei yang menyoroti pentingnya kebijakan untuk meningkatkan ketahanan atas berkembangnya peningkatan risiko global.

Angel Gurría mengatakan bahwa tingkat kepercayaan (*confidence level*) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi

daripada semua negara-negara OECD. Menkeu menanggapi bahwa hasil temuan survei tersebut bisa menjadi basis untuk kerjasama kedepan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program. Survei tahun 2018 ini juga menandai peringatan 10 tahun kolaborasi pemerintah Indonesia dengan OECD dalam program ini.

Survei OECD menyoroti perkembangan terkini dan juga tantangan yang dihadapi negara untuk terus maju. Hasil survei memprediksi pertumbuhan Indonesia 5,2 persen tahun ini dan 5,3 persen di 2019, dan juga memaparkan agenda untuk membuat ketahanan ekonomi semakin kuat dan semakin inklusif.

“Ekonomi Indonesia semakin berkembang sehat dan bonus demografi akan semakin mempercepat pertumbuhan tahun depan. Hal ini ditopang oleh tingkat kepercayaan (*confidence level*) kepada pemerintah Indonesia lebih tinggi daripada semua negara-negara OECD.

Hasil temuan survei ini bisa menjadi basis untuk kerjasama ke depan dalam konteks OECD-Indonesia Joint Work Program,” kata Gurria.

“Saya sangat senang bahwa pandangan umum OECD terhadap ekonomi Indonesia sangat positif dan sangat menginspirasi,” ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menanggapi tiga hal itu, pemerintah telah mempersiapkan antara lain: pemerintah menargetkan peningkatan pemasukan pajak 16,4 persen pada 2019, sejumlah program peningkatan kapasitas pemuda seperti pendidikan anak usia dini dan akses terhadap sertifikasi guru dan dana operasional sekolah. Sedangkan untuk pariwisata, Presiden memberi perhatian khusus dan telah mengalokasikan dana khusus untuk mendukung pariwisata, serta terus melakukan pendekatan holistik sesuai dengan strategi nasional pariwisata.



Indonesia Ajak Dunia Berbagi tentang Pembiayaan Bencana

Indonesia belakangan ini sering dilanda bencana, seperti gempa yang terjadi baru-baru ini di Lombok, Palu, dan Donggala. Hal ini karena Indonesia memang menjadi salah satu negara yang memiliki risiko tinggi terhadap bencana.

Data Bank Dunia menunjukkan bahwa Indonesia termasuk 35 negara di dunia dengan risiko tinggi terjadinya korban jiwa akibat bencana.

“Momen ini menjadi momen yang tepat karena kita baru saja mengalami bencana, dan mencari solusi yang tepat apabila terjadi bencana. Bagaimana upaya kita mengatasi bencana dengan ketahanan fiskal yang terjaga, dan tidak hanya tergantung pada kerjasama internasional” ujar Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menyampaikan *keynote speech* pada seminar yang bertepatan ‘Disaster Risk Finance and Insurance’ di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua Bali, Rabu (10/10).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD, bahkan harus merealokasi anggaran. “Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat. Sebuah strategi jangka panjang untuk membangun ketahanan (*resiliency*) terhadap bencana alam, khususnya dari sisi fiskal” kata Sri Mulyani.

Karena itu, Menkeu menyatakan Indonesia membuka diri untuk menimba pengalaman dari negara-negara lain mengenai pembiayaan bencana. “Kami ingin belajar dari Filipina yang sudah mengasuransikan gedung-gedung pemerintahan daerah, belajar

dari Maroko yang sudah mengasuransikan UMKM dan rumah-rumah penduduk berpenghasilan rendah” ungkap Sri Mulyani.

Karena itu menurutnya, pada tahun anggaran 2019 mendatang, semua gedung pemerintah akan diasuransikan, meski belum termasuk rumah-rumah penduduk menengah dan bawah karena mekanisme asuransi untuk itu belum tersedia.

Sebagai gambaran besarnya kerugian dan pendanaan yang diakibatkan oleh bencana, di antara tahun 2004-2013, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp126,7 triliun. Selama 12 tahun terakhir, pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan untuk bencana sebesar Rp3,1 triliun. Sementara bencana alam besar seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2014 mencapai Rp51,4 triliun. Jurang pembiayaan tersebut menjadi salah satu sebab Indonesia terpapar risiko fiskal akibat bencana alam.

Karena itu, pemerintah Indonesia sedang menyiapkan peta jalan (*roadmap*) mengenai pembiayaan dan asuransi risiko bencana, baik untuk jangka pendek, maupun jangka panjang.

Teks
Biro KLI

Foto
Irfan Bayu

Keuangan Syariah Bisa Berperan dalam Pembiayaan Infrastruktur

Berbagai negara yang sedang menggalakkan pembangunan di bidang infrastruktur kini mulai melibatkan pihak swasta dalam solusi pembiayaannya. Salah satu yang mulai sering dilakukan adalah penggunaan dana investasi berbasis syariah, khususnya untuk menjembatani kebutuhan pendanaan antara pihak swasta dan pemerintah.

Karena itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendorong investor dan para pelaku keuangan syariah di Indonesia untuk terlibat dalam pembiayaan infrastruktur, khususnya dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Bila melihat kebutuhan Indonesia akan pembangunan infrastruktur saat ini, masih ada celah yang harus kita isi. Karena itu, menerapkan pembiayaan berbasis syariah dalam KPBU merupakan platform alternatif yang baik untuk skala lokal maupun global” ujar Menkeu di hadapan peserta diskusi bertema *‘Investor Roundtable on Islamic Infrastructure Finance.’*

Potensi pelibatan keuangan syariah dalam pembangunan, khususnya terkait pembiayaan infrastruktur, lanjut Sri Mulyani, sangat besar terutama bila melihat berbagai perkembangan saat ini. Dalam satu dekade terakhir, keuangan

Islam berkembang sangat cepat dalam industri keuangan global.

“Karena itu saya berharap, dengan melibatkan prinsip-prinsip keuangan syariah dalam KPBU, maka akan ada peluang mendatangkan pendanaan yang cukup besar dari para investor muslim yang selama ini enggan terlibat dalam pembiayaan konvensional” ujar Menkeu.

Berdasarkan laporan terbaru, infrastruktur global membutuhkan sekitar USD3-4 triliun per tahun hingga tahun 2030. Sementara pendanaan yang tersedia dari pemerintah dan Bank Pembangunan Multilateral per tahun, hanya sekitar USD300 miliar.

McKinsey juga mencatat bahwa investor institusional memiliki dana sebesar USD120 triliun yang tersimpan di bank. Karena itu, pihak swasta memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan pendanaan tersebut.

Pembahasan soal pembiayaan infrastruktur berbasis syariah di ajang Pertemuan Tahunan IMF-WBG ini adalah atas kerjasama Grup Bank Dunia dengan Bank Pembangunan Islam. Menkeu berharap agar forum ini bisa menghasilkan berbagai pemikiran dan platform yang bernilai bagi para pengambil kebijakan dan para investor, khususnya dalam hal pembiayaan infrastruktur.

Teks
Biro KLI

Foto
Tino Adi
Prabowo

Teknologi Adalah Peluang, Bukan Ancaman



Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dan pendiri Bill & Melinda Gates Foundation, Melinda Gates, sepakat bahwa kemajuan teknologi harus dipandang sebagai peluang. Menkeu menegaskan bahwa revolusi teknologi berikut disrupsi yang terjadi, menawarkan berbagai peluang sekaligus tantangan.

“Ini adalah cara baru untuk meningkatkan kesejahteraan banyak orang, termasuk mereka yang tinggal di negara berkembang. Sekarang tinggal bagaimana memastikan agar teknologi bermanfaat untuk pertumbuhan inklusif” ujar Menkeu dalam diskusi bertajuk *Policies for Harnessing Technology for Growth.*

Lebih lanjut Menkeu mengatakan, negara berkembang harus mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi. Di Indonesia misalnya, teknologi digital telah menghubungkan sektor ekonomi informal dengan sektor formal. Karena itu, Indonesia perlu segera memulai diskusi baru dengan negara-negara berkembang lainnya. Tujuannya, agar mereka bisa mengkapitalisasi teknologi baru serta mengelola disrupsi yang terjadi.

“Kami tidak ingin mengorbankan manusia untuk teknologi. Negara ini masih dalam kategori pendapatan menengah dan kita punya unicorn yang cukup mapan. Ini kesempatan untuk menciptakan kesempatan” kata Menkeu.

Teks
Biro KLI

Foto
Faiz Ahmad

Mengatasi ketidaksetaraan digital adalah kunci menjadikan teknologi sebagai peluang. Dengan tiga miliar jiwa yang diprediksi akan tetap *offline* pada tahun 2023 dan semakin banyak lagi yang gagal memperoleh potensi internet secara penuh, pendekatan bisnis biasa tidak akan mampu menjangkau orang-orang yang termajinalkan.

“Indonesia adalah negara besar dan tidak semua teredukasi dengan baik. Ini harus ditanggulangi. Kami harus memastikan tidak ada yang tertinggal dan memastikan teknologi bisa bermanfaat untuk meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan” ujar Menkeu.

Sementara, Melinda Gates mengatakan bahwa dirinya bersama Sri Mulyani membentuk Komisi Pathways dengan tujuan untuk menyebarluaskan manfaat positif teknologi. “Kami sangat senang berbicara dengan Gojek. Tidak hanya pengemudi, tapi juga pedagang. Peluang transformasi digital ini sangat menjanjikan”, ujar istri Bill Gates ini.

Dalam diskusi ini juga terungkap berbagai risiko kemajuan teknologi. Misalnya, ancaman kehilangan pekerjaan dan kebutuhan investasi baru untuk kebutuhan tata kelola teknologi. Di sisi lain, kemajuan teknologi akan menciptakan efisiensi, peluang-peluang baru dalam ekonomi global, serta cara baru untuk berinteraksi dengan masyarakat.

Indonesia Sambut Positif Human Capital Index



Teks
Biro KLI

Foto
Agus Tri
Hananto

pengukuran produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini.

Untuk komponen probabilitas hidup, Indonesia unggul dari negara-negara Asia Selatan dan Afrika. Untuk komponen kualitas dan kuantitas pendidikan, Indonesia unggul dari Negara-negara Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Afrika. Namun, untuk *stunting*, posisi Indonesia masih dianggap memiliki tantangan.

Indonesia telah mengalokasikan 20 persen anggaran untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru, manajemen sekolah, dan proses belajar mengajar peserta didik. Pemerintah Indonesia juga memberi perhatian besar pada pendidikan vokasi untuk menghadapi revolusi industri 4.0, teknologi informasi, dan partisipasi sektor swasta dalam pendidikan.

Dalam menghadapi isu pembangunan digital, pemerintah memperkenalkan beberapa kebijakan strategis. Diantaranya, dengan memperbaiki kurikulum pendidikan dan meningkatkan kompetensi pekerja. Misalnya, melalui pelatihan vokasi dan program magang, serta sertifikasi profesi di seluruh institusi di seluruh wilayah Indonesia.

perkembangan pendidikan dan kesehatan secara lebih rinci, termasuk dalam hal penanganan *stunting* atau gagal tumbuh.

“Isu *stunting* dan pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Jangan sampai ada yang tidak tahu perkembangan masalah ini. Bila itu terjadi, Anda sedang menyiapkan generasi yang tidak berkualitas untuk masa depan negara anda” tegas Presiden Kim.

HCI didesain untuk menjelaskan perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan untuk mendukung produktivitas generasi yang akan datang. HCI mengkombinasikan komponen-komponen probabilitas hidup hingga usia 5 tahun, serta kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan. Komponen tersebut merupakan bagian utama dari

Pemerintah Indonesia menyambut baik upaya Bank Dunia yang semakin fokus pada persoalan modal manusia, termasuk dengan meluncurkan *Human Capital Index (HCI)*. Dalam hal ini, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang menjadi *early adaptor* HCI yang baru.

“Kami siap bekerjasama karena Indonesia memiliki pengalaman berharga dalam investasi modal berharga,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat berbicara dalam forum *Human Capital Summit, A Global Call to Action*.

Bank Dunia sendiri menyambut baik langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam mengembangkan modal manusia. Diakui oleh Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim, para pemimpin negara harus melihat



Pemerintah Dorong Ekspor Industri Strategis Melalui LPEI

Menkeu Sri Mulyani mengatakan bahwa mandat khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dapat mendorong BUMN dan swasta untuk memperluas pasar ekspor ke negara-negara prospektif. Misalnya saja kawasan Afrika, Asia Selatan, dan Amerika Selatan. Menkeu juga mengajak pemerintah negara-negara tersebut untuk menjalin kerjasama dengan LPEI.

Hal ini disampaikan Menkeu pada acara *Business Luncheon on Indonesia Financing Scheme* di tengah Pertemuan Tahunan IMF-WBG Bali 2018. Forum ini membahas dukungan pemerintah Indonesia kepada industri strategis untuk melakukan ekspor melalui skema Penugasan Khusus Ekspor (PKE) oleh LPEI.

“LPEI dibentuk untuk memperkuat layanan pembiayaan kepada sektor swasta. LPEI juga telah mengembangkan instrumen pembiayaan syariah. Saat ini kita ingin memperkuat dan menjalin kerjasama yang telah kita bangun dalam perdagangan dan investasi, terutama dengan *partner* kita di Afrika, Bangladesh, Srilanka, dan lainnya,” kata Menkeu.

Menkeu menambahkan, LPEI dapat melaksanakan tugas khusus yang disebut *National Interest Account (NIA)* untuk mendukung ekspor nasional dengan pembiayaan dari Pemerintah. Dengan adanya instrumen keuangan, Indonesia bisa memperkuat kerjasama dengan menawarkan pinjaman dan perdagangan yang kompetitif dan membangun relasi dengan para investor. “Kita ingin membangun interaksi dengan negara lain dan kita ingin lebih kompetitif,” kata Menkeu.

Teks
Biro KLI

Foto
Faiz Ahmad

Adapun kesiapan industri strategis Indonesia untuk ekspor meliputi konstruksi, farmasi, pesawat udara, kereta api dan pertambangan. Semuanya telah memiliki daya saing untuk turut meramaikan perdagangan internasional dan investasi luar negeri.

Negara-negara mitra dagang yang turut hadir dalam acara ini antara lain Angola, Bangladesh, Kamerun, Pantai Gading, Djibouti, Ethiopia, Gabon, Mali, Mozambik, Namibia, Niger, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Tanzania, Timor Leste, Zambia, Zimbabwe, dan Somalia.

Pada kesempatan ini, LPEI memperlihatkan implementasi kongkret program PKE dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Timah Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Nota ini berisi pengerjaan proyek bersama dan komitmen LPEI untuk memberikan dukungan pembiayaan investasi serta modal kerja ekspor.

LPEI didirikan pemerintah untuk menumbuhkan ekspor nasional, melalui peningkatan daya saing melalui fasilitasi berbentuk pembiayaan, asuransi, penjaminan, dan jasa konsultasi.

Semangat Juang Untuk Hadapi Tantangan Bangsa

Tanggal 10 November merupakan salah satu hari sakral di Indonesia. Pada hari ini, seluruh anggota masyarakat memperingati Hari Pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rais Abin, Ketua Umum Legiun Veteran Indonesia (LVRI) menceritakan kepada Media Keuangan, bagaimana semangat persatuan dan nilai juang tersebut masih tetap relevan untuk menghadapi tantangan bangsa di masa yang akan datang.

Seperti apa awal mula cerita Anda bisa ikut memperjuangkan kemerdekaan?

Saya veteran yang sudah berumur 92 tahun. Tanpa rasa sombong, saya merasa ikut mendirikan negeri ini bersama teman-teman seperjuangan. Perjuangan ini sebenarnya juga dibangun juga oleh Jepang. Saat itu, kita adalah bangsa yang terjajah. Politik Jepang ketika itu menyatakan kita berhak untuk menjadi bangsa yang berdaulat dalam Asia Timur Raya.

Selain dari Jepang, semangat perjuangan itu juga dibangun oleh Sumpah Pemuda. Bisa dikatakan Sumpah Pemuda adalah pengikat kita yang paling kuat. Satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Itu yang harus kita syukuri. Meskipun ada

keretakan dimana-mana, sampai sekarang persatuan masih dapat kita pertahankan.

Perjuangan saya sendiri sangat sederhana. Saya tidak punya pendidikan tinggi. Malah sebetulnya saya bekerja di perkebunan. Namun pekerjaan tersebut saya lepaskan karena saya terlibat dalam Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), sebuah gerakan kemerdekaan.

Waktu itu usia saya 18 tahun. Meski tidak memiliki ilmu apa-apa tetapi saya lulus seleksi di Yogyakarta. Kelebihan saya adalah di bahasa. Kebetulan sewaktu saya sekolah di Sukabumi itu, saya *indekost* pada salah satu keluarga Inggris. Akibatnya saya turut memiliki kemampuan bahasa Inggris yang dapat digunakan.

Hasil seleksi menempatkan saya ke dalam tim penyelundupan senjata ke Sumatera Selatan, sebab saat itu baik komunikasi maupun logistik semua diblokir oleh Belanda. Saya harus pergi pakai perahu Bugis yang panjangnya hanya 5 meter bersama 1 orang nahkoda dan 1 orang anak buah kapal. Jangankan kompas, lampu saja tidak ada. Tetapi kenyataannya saya berhasil sampai. Di Palembang saya bertemu gubernur militer bapak Adnan Kapau Gani. Dari sanalah saya mulai mulai diberi pelatihan.

Saat saya berumur hampir 20 tahun, saya diberi 1 kapal cepat bekas perang dunia kedua. Saya menjadi komandonya. Sejak saat itu saya bergerak ke Singapura membawa alat perhubungan, senjata, dan alat kesehatan untuk wilayah Sumatera Tengah dan Jawa. Itulah yang saya lakukan selama 3,5 tahun, membantu penyelundupan senjata untuk membantu operasional kita di darat.

Saat LVRI pertama kali didirikan semangat apa yang diusung?

Jadi begini. Pada tahun 1957 para veteran pejuang baru menyadari bahwa kita mempunyai aset yang sangat berarti bagi bangsa. Aset itu memungkinkan kita mengalahkan musuh tanpa kekuatan fisik. Kita mengalahkan musuh dengan kekuatan spiritual, dengan jiwa, semangat, dan nilai juang.

Nah, sebelum semangat ini hilang di tengah perjalanan bangsa, lebih baik dijaga melalui LVRI. Jadi, lahirnya LVRI adalah untuk mengamankan sebetulnya semangat yang sangat berarti dalam perjuangan kemerdekaan. Semangat dan nilai juang itu harus dapat digunakan dalam menghadapi tantangan apapun yang dihadapi bangsa, *kan*. Jangan perangnya aja yang diingat.



Rais Abin, Ketua Umum Legiun Veteran Indonesia.

Foto Resha Aditya Pratama

Bagaimana Anda melihat kesejahteraan para veteran saat ini?

Misi pertama LVRI itu adalah mengamankan kehormatan dan kesejahteraan para veteran. Jadi yang utama adalah kehormatan. Sebetulnya, saya tidak pernah mengalami kurangnya rasa hormat terhadap veteran. Tetapi untuk kesejahteraan memang ada ujian-ujian. *Alhamdulillah*, saat ini sudah hadir Undang-undang Veteran 15 nomor tahun 2012.

UU ini meningkatkan kesejahteraan bagi veteran. Selain tunjangan veteran, saat ini juga sudah ada dana kehormatan. Malahan kemarin Presiden menaikkannya lagi hingga 25 persen. Jadi, veteran di seluruh nusantara sudah memiliki penghasilan yang cukup. *Kan* dulu ada gambaran seolah-olah veteran itu jualan koran, jualan kalender, tapi sambil nodong katanya, *gitu kan ya?* Sekarang *Alhamdulillah* *ndak* ada lagi.

Ada berapa anggota LVRI? Apa saja kegiatannya?

Saat baru didirikan tahun 1957, anggota LVRI ada 1 juta orang lebih. Tetapi kemudian banyak yang melepaskan diri dari kevetenerannya karena kembali bekerja, sehingga anggota kita menjadi 900 ribu orang. Namun dalam 10 tahun terakhir, setiap bulan kita kehilangan 60 orang anggota. Jadi saat ini kurang lebih hanya ada 135 ribu anggota terdaftar di seluruh Indonesia.

Untuk menjaga kekeluargaan kami juga bermitra dengan Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia yang berdiri sekitar tahun 1980an. Kami mengadakan dialog secara teratur untuk menampung kesulitan-kesulitan yang ada pada keluarga veteran yang kiranya bisa kita atasi. Jadi tugas DPD juga untuk memastikan para veteran dan janda veteran mendapatkan hak-haknya.

Sebagai mantan penjuang, bagaimana Anda melihat kondisi Indonesia saat ini?

Kita harus mengakui baik dari dalam maupun dari luar selalu akan ada ancaman, *ya toh?* Dari luar ada perebutan para *super power*. Baik Cina, Amerika, atau negara manapun pasti punya ambisi untuk merangkul kita ke dalam lingkaran kekuasaannya. Itu tetap harus kita hadapi. Kalau untuk perang fisik saya kira sudah *nggak* mungkin lagi, terutama dengan adanya ASEAN dan dewan keamanan PBB yang sangat aktif.



Tapi di internal, kondisi demokrasi kita masih sering mengganggu. Saya selalu menganggap bahwa Sumpah Pemuda cukup dijadikan pegangan. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Kalau sekarang kita bicara tentang reformasi, hal yang utama itu *kan* mental.

Reformasi birokrasi dan administrasi perlu diutamakan karena masih banyak masalah. Tetapi, kalau mental kita tidak diperbaiki, reformasi tidak akan jalan. *Nah*, sekarang bagaimana cara kita memperbaiki mental. Tanggal 23 Oktober kami akan membuat Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pendidikan untuk meninjau ulang buku bacaan agar lebih banyak lagi mewariskan nilai dan semangat juang.

Bagaimana cara Anda menyampaikan pesan perjuangan kepada generasi muda?

Suasana waktu itu memang beda ya. Dulu kita tidak punya modal apa-apa. Tetapi tidak ada yang memperhatikan soal materi, soal status, atau soal tingkat pendidikan. Semua orang terjun begitu saja bersama-sama. Kenapa? Karena diikat oleh pengertian dan jiwa yang sama. Sekarang alamnya sudah beda, bukan lagi alam perjuangan yang saya kenal. Perkembangan dan perubahan tidak bisa dihindari.

Dalam berkomunikasi dengan generasi muda, pertama-tama kami harus memahami mereka dulu. Sebab kalau tidak nanti akan timbul dialog. Misalnya, ketika menghadapi lembaga-lembaga pendidikan atau pesantren-pesantren, setiap lingkungannya harus diperhatikan, karena masing-masing memiliki kekhususan. Pendekatan ke Sekolah Menengah Atas biasa dengan pesantren tentu harus berbeda.

Namun, pesan yang sampaikan selalu sama yaitu kembalilah ke sejarah. Dengan mempelajari sejarah kita jadi tahu dimana

kekuatan dan kelemahan kita. Sejarah memberikan modal yang sangat besar bagi kita. Misalnya, dengan mempelajari Undang-Undang Dasar mereka menjadi sadar bahwa negara ini didirikan untuk semua golongan, semua agama, tidak kiri dan tidak kanan.

Seperti apa harapan Anda terhadap LVRI ke depan?

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15, veteran terdiri atas 3 golongan. Ada veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, dan veteran perdamaian. Veteran pembela kemerdekaan ini adalah mereka yang terkait dengan Operasi Trikora, Dwikora dan Seroja di Timor Timur. Status mereka ini sebetulnya adalah sebagai penerus veteran pejuang.

Selanjutnya, tugas mereka diteruskan oleh veteran pembela kemerdekaan dan veteran perdamaian ini. Saya berharap, organisasi LVRI tidak sampai buntu di tengah jalan. Nanti kami akan menarik generasi-generasi muda untuk membantu dalam operasi kita dalam bela negara. Untuk menyelamatkan misi ini.

Teks Irma Kesuma

MODERNISASI CORE TAX SYSTEM

Merupakan sistem teknologi informasi yang menyediakan dukungan terpadu bagi pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Pajak termasuk otomasi proses bisnis mulai dari proses pendaftaran, pemrosesan SPT dan dokumen perpajakan lainnya, pembayaran pajak, dukungan pemeriksaan dan penagihan, hingga fungsi taxpayer accounting.

Reformasi Perpajakan

Pendaftaran

- Pendaftaran dapat dilakukan dimana saja
- Tambah saluran pendaftaran melalui Mall Layanan Publik, PTSP, AHU
- Register dan update data melalui call center
- e-tracking status permohonan
- Penyederhanaan dokumen dan proses

Pembayaran

- Lebih mudah, cepat, akurat karena sistem terintegrasi
- Tersedia akses informasi validitas pembayaran
- Penyederhanaan proses pengembalian dan pemindahbukuan
- Pengembalian pajak berbasis risiko

Pengelolaan SPT

- Generate SPT dari faktur dan bukti potong
- Auto alert ketidaklengkapan SPT
- Informasi lebih valid dalam pengisian SPT
- Compliance cost menurun

Taxpayer Service

- Akses informasi dan edukasi lebih mudah, cepat, akurat
- e-tracking progress permohonan
- Early warning kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- Perluasan saluran layanan (online, manual, call center)
- Akses layanan borderless (dimana saja dan kapan saja)

Taxpayer Account Management

- Akses data dan informasi lebih mudah
- Layanan perubahan data di call center
- Identifikasi data dan informasi menggunakan NIK/NPWP

Knowledge Management

- Dukungan pengelolaan pengetahuan
- Pelayanan perpajakan lebih baik
- Penerapan pengumpulan, pengembangan, dan pembagian pengetahuan

Data Quality Management

Pengelolaan kualitas data lebih baik dan data lebih terjamin dan reliable

KPKNL Surakarta

Jaminan Kepastian Pemenuhan Pelayanan

Pemerintah tengah gencar melakukan revaluasi atau penilaian kembali aset negara yang ditarget selesai di 2018 ini. Tugas ini dilaksanakan oleh DJKN, termasuk melalui jajaran di kantor-kantor vertikalnya

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut, DJKN hadir di pelosok nusantara melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Salah satu kantor vertikal di bawah DJKN yang cukup menonjol adalah KPKNL Surakarta.

Kantor ini memiliki wilayah kerja meliputi wilayah eks Karasidenan Surakarta, yaitu: Kota Solo, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Klaten, Wonogiri dan Karanganyar. Sejarah kantor pelayanan ini telah ada sejak masih berbentuk Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) di tahun 2002. Sejak perubahan organisasi DJKN yang disusul dengan perubahan struktur organisasi, termasuk instansi vertikalnya, di tahun 2008 kantor ini berubah menjadi KPKNL.

Selalu optimalkan pelayanan

Dampak perubahan bentuk kantor vertikal yang semula mengurus administrasi terkait lelang dan



pengelolaan kekayaan negara ini adalah menjadi memomorsatukan pelayanan. Dari tahun ke tahun, usaha optimalisasi pelayanan terus dilakukan. Pelayanan yang diberikan harus berorientasi pada kepuasan para pengguna layanan.

Beberapa strategi yang dikembangkan kantor yang dipimpin oleh Andi Soegiri ini antara lain pemenuhan ketersediaan sarana dan prasarana yang bisa mengakomodir kebutuhan seluruh pengguna layanan. Fasilitas yang dibangun pun selaras dengan kebijakan yang diterapkan di Kementerian Keuangan. Contohnya untuk pengarusutamaan *gender*, dibangun ruang laktasi dan *playground*. Sedangkan untuk pengguna layanan yang berkebutuhan khusus telah disediakan kursi roda serta *ramp* yang memudahkan mobilisasi mereka.

Untuk kemudahan administratif, disediakan *e-corner* yang membantu pengguna jasa untuk mengakses layanan

dan informasi KPKNL. Untuk pengawasan dalam upaya peningkatan layanan terdapat SIMOLA-KN. Sistem tersebut adalah sarana bagi pimpinan dalam mengevaluasi kinerja pelayanan. "Sebelum kantor lain menerapkan inovasi semacam itu, kantor kami sudah," jelas kepala kantor yang akrab dipanggil Andi ini.

Karena beragam inovasi yang diterapkan di KPKNL Surakarta, pada Peringatan Hari Oeang ke-71 tahun 2017 lalu, kantor ini dianugerahi gelar sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Pertama di Lingkungan Kementerian Keuangan Unit Eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan pada upacara peringatan Hari Oeang.

Prestasi membanggakan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh pegawai untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan. Terlebih bagi Andi yang memang baru menjabat posisi Kepala



Kepala KPKNL Surakarta, Andi Soegiri, bersama jajaran pejabat Eselon IV.

Suasana di ruang pelayanan KPKNL Surakarta.

Tampak depan Gedung KPKNL Surakarta.

Foto Abdul Aziz

KPKNL Surakarta selama 5 bulan. Namun pria ini berkomitmen untuk meningkatkan kesempurnaan pelayanan sambil terus melahirkan inovasi baru lainnya.

Saling hormat tanpa sekat

Dalam memimpin kantor yang memiliki jumlah pegawai sebanyak 47 PNS dan 10 pegawai honorer ini Andi menerapkan prinsip keterbukaan dan menanamkan komitmen pelayanan. Ia juga mengedepankan azas kekeluargaan dalam membentuk kedekatan personal dengan seluruh jajaran. Untuk itu dirinya mendukung kegiatan informal di luar jam kantor seperti futsal dan senam bersama, maupun kegiatan bermusik bersama dengan membentuk band kantor.

Selain itu, Andi juga sering bertamu ke rumah pegawainya sebagai upaya untuk lebih dekat dan tahu lebih dalam tentang kebutuhan pegawainya. Ia menganggap bahwa kondisi di rumah sangat

mempengaruhi kinerja seseorang di kantor. Untuk itu ia bersikap proaktif dengan mencari tahu jika ada sesuatu yang mungkin bisa bantu atau sekedar menjadi tempat berkeluh kesah.

Tugas utama sebagai pemimpin adalah harus terus mengingatkan jaminan komitmen pelayanan maksimal dari pegawainya. Tak henti-hentinya ia menekankan dalam tiap kesempatan pentingnya hal tersebut. "Ini kantor milik kita bersama. Tidak ada sekat, semua harus saling mengingatkan dan melaporkan jika menemukan kesalahan." tegas pria yang asal Puwokerto ini.

Kejar pemenuhan capaian

Diakui Andi bahwa sampai triwulan ke-3 ini KPKNL Surakarta belum memenuhi capaian. Namun tingkat ketercapaiannya sudah melebihi 90 persen. Seluruh jajaran pegawai di kantor ini yakin bahwa kekurangan capaian tersebut akan bisa dicapai sebelum akhir tahun 2018. "Empat tahun kemarin NKO kami selalu melebihi 100 persen, saya yakin tahun ini pun akan bisa tercapai segera," ungkapnya.

Kendala utama yang sedang dihadapi kantor ini adalah terkait sertifikasi. Sebenarnya untuk hal ini tahapan pengukuran telah dilakukan, tinggal penerbitan sertifikat saja yang ditarget selesai bulan November ini. Salah satu tantangan terberat yang dihadapi datang dari eksekusi penilaian. Contohnya dalam penilaian oleh Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo yang wilayahnya mencakup Wonogiri hingga ke Bojonegoro.

"Secara kuantitas kami telah selesai prosesnya. Tinggal mengejar sisi kualitas, apakah seluruh data telah sesuai. Karena untuk revaluasi saat ini audit dari Itjen (Inspektorat Jenderal) dan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) juga turun. Jadi kami harus menjamin kualitas dari laporan hasil penilaian kami telah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya!" seru Andi.

Pasti iso!

Saat menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seluruh jajaran di KPKNL Surakarta diingatkan dengan motto organisasinya. Motto yang dimaksud adalah PASTI (professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovasi). Sebuah akronim sederhana namun penuh makna. Untuk semakin membakar semangat, motto tersebut selalu diucapkan dengan imbuhan kata dalam bahasa jawa: *iso* (bisa). Pasti iso! Segala tantangan pasti bisa dihadapi.

Selain itu. *Tagline* tersebut juga memberi jaminan kepastian bagi para pengguna jasa. Bahwa, pelayanan yang diberikan kantor ini dijamin kepastiannya yang mencakup prosedur, biaya, administrasi dan jaminan hak dan kewajiban bagi para pengguna jasa. "Seseorang yang datang ke sini ada kepastian bahwa kebutuhan yang diurus pasti selesai." tutupnya.

Teks Dimach Putra



*Robert Leonard Marbun,
Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara*

Terus Berkontribusi Dalam Arus Reformasi

Teriakan penonton di salah satu lapangan sepak bola terkenal di Medan terdengar bergemuruh. Hari itu merupakan hari yang tak terlupakan bagi sesosok anak kecil. Sembari dibonceng motor bebek keluaran tahun tujuh puluhan, ia tak perlu risau serangan terik matahari. Kegemaran sang ayah untuk menonton pertandingan bola menjadi hal yang selalu ia kenang sepanjang masa. Walau ia tak terlalu menyukai sepak bola, memori-memori bersama sang Ayah menjadi serpihan masa kecil yang menginspirasi hingga sekarang.

Ia memang tak lama dibesarkan oleh orang tuanya. Meski dibesarkan dalam beberapa lingkungan yang berbeda, masih kuat dalam ingatannya sosok seorang Ayah. Salah satu nilai yang ia pelajari dari Ayahnya adalah jangan pernah berhenti belajar. Ia selalu diingatkan untuk tidak berhenti mengembangkan diri. Sosok ayah yang berprofesi sebagai dokter turut menginspirasi untuk memiliki hobi membaca. Setiap hari, ia terbiasa melihat Ayahnya membaca buku hingga larut malam.

Hasilnya, ia pun kini berhasil menyelesaikan program pendidikan Master of Policy Analysis dan Doctor in Economics di Jepang. Ialah Robert Leonard Marbun, Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara yang beberapa waktu lalu diangkat pula menjadi Ketua Komite Audit Kementerian Keuangan.

Tak lama larut dalam kehidupannya di Jepang, paska lulus program doktoralnya, Robert berkomitmen untuk langsung kembali ke tanah air. Tujuannya jelas, ia ingin memberikan kontribusi kepada Indonesia.

“Sekecil apapun pokoknya saya bisa berkontribusi sesuatu untuk bangsa. Alasan saya pulang ke Indonesia setelah sekolah memang itu, jadi ingin berkontribusi. Saya pernah diledekin sama mertua, ‘Nggak masuk akal kamu pulang ke Indonesia dengan gaji yang hanya segitu’. Tapi saya melihat di Indonesia itu banyak sekali yang bisa kita lakukan, dan bangsa kita itu besar sekali dan luar biasa sekali. Saya pun punya keyakinan bangsa kita bisa jadi besar luar biasa,” ujarnya.

Menjaga penerimaan negara

Sempat berpindah-pindah penugasan, Robert pernah menjabat Kepala KPUBC Yogyakarta, Kepala

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sulawesi, hingga ke Kantor Pusat DJBC sebagai Direktur Kepabeanaan Internasional dan Antar Lembaga yang sebelum akhirnya dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara. Baginya, seorang staf ahli memiliki peran penting untuk memberikan masukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu).

“Kita berkolaborasi supaya kebijakan yang dihasilkan itu terintegrasi, komprehensif, terus memberikan dampak ke ekonomi nasional dengan mempertimbangkan antara yang positif dan negatifnya. Jadi, berusaha meminimalkan yang negatifnya. Kalau program besarnya seperti itu. Terus yang kedua kan posisi saya sebagai Ketua Komite Audit. Nah, sebagai Ketua Komite Audit itu ada beberapa arahan khusus dari Menkeu,” jelasnya.

Memimpin Komite Audit

Sempat merasa bimbang setelah ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit karena tidak memiliki latar belakang auditor, Robert pun segera mencari informasi melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait tugasnya. Ia pun mahfum bahwa mandat yang ia terima sebagai *oversight* tim Audit bukanlah hal yang mudah.

Berdasarkan KMK Nomor 252 Tahun 2018, setidaknya ada tiga tugas utama dari Komite Audit. Pertama adalah membantu Menkeu dalam melakukan pengawasan atas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal (Itjen). Kedua, memberi saran dan masukan kepada Menkeu dan/atau Inspektur Jenderal dalam rangka perbaikan pelaksanaan pengawasan intern oleh Itjen, perbaikan kualitas pelaporan keuangan tingkat Kemenkeu, dan pelaksanaan tindak lanjut

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Yang terakhir adalah memberikan masukan terkait pengangkatan dan pemberhentian Inspektur Jenderal atas permintaan Menkeu.

“Begitu saya baca KMK-nya wah ini *ngeri* tugasnya. Tetapi saya senang kalau ditantang seperti itu. Pokoknya saya akan lakukan yang terbaik,” ujarnya.

Robert tidak sendirian dalam Komite Audit. Ia dibantu oleh dua orang anggota komite lainnya, Binsar H. Simanjuntak dan Dian Puji N. Simatupang. Selain itu, ia juga dibantu oleh Sekretariat Komite Audit dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Tak perlu waktu lama untuk menyatukan visi dengan para anggotanya. Kepribadiannya yang berpikiran positif mempermudah komunikasi dan menyamakan visi bersama dengan anggota Komite Audit yang lain.

“Ternyata ketika bertemu dengan mereka (anggota Komite Audit) lebih dari yang saya ekspektasikan. Paling waktu itu kira-kira kita cuma butuh waktu sekali/dua kali ngobrol saja sudah langsung *chemistry*-nya sama,” kenang dia beberapa saat setelah ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit.

Reformasi auditor internal

Bercerita keberadaan Itjen Kemenkeu sebagai auditor internal, Robert mengemukakan adanya reformasi birokrasi yang sangat terasa sejak tahun 2008. Itjen bukan hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga berjalan bersama sebagai mitra untuk memperbaiki Eselon I lainnya.

“Menurut saya Itjen ini salah satu yang sangat progresif. Yang paling penting itu kan *mindset*-nya. Makanya saya bilang paling berhasil karena cepat sekali menyesuaikan. Dan itu bukan



Pelantikan Robert Leonard Marbun menjadi staf ahli bidang kebijakan penerimaan negara.

Foto Dok.Pribadi

sesuatu yang gampang untuk berubah karena sudah terbiasa,” ungkapnya.

Tidak hanya itu, Robert juga melihat peran Itjen tidak hanya untuk kepentingan internal Kemenkeu saja. Saat ini, Itjen juga turut menularkan reformasi ke Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya. Reformasi dikatakan berhasil apabila tidak hanya diri sendiri yang menikmati, namun juga mampu menularkannya kepada orang lain.

Quality time

Meski memiliki kesibukan yang luar biasa, Robert selalu memperlakukan pekerjaan dan keluarganya sama pentingnya. Ia selalu berusaha berlaku adil kepada keluarganya. Misalnya, ia sengaja memilih untuk membesarkan anaknya tanpa bantuan *babysitter*. Ia lebih memilih membesarkan anaknya bersama sang istri sendiri agar hidupnya lebih lengkap dan seimbang.

“Itu sebenarnya kan tinggal kita atur mana yang jadi prioritas. Jadi intinya kalau di kantor jangan menunda, jadi jangan pernah menunda pekerjaan. Kalau bisa dilakukan sekarang lakukan sekarang. Kalau saya dalam bekerja itu selalu saya atur. Kalau saya, hari ini terus saya kerjakan, terus dikerjakan, konsisten kita kerjakan terus kan pasti bisa selesai juga akhirnya,” ungkapnya.

Ia juga selalu menyempatkan diri bermain bersama anaknya. Untuk mengisi waktu bersama sang istri, ia sering mengajaknya berolahraga lari pada malam hari. Di akhir pekan, ia juga

mempunyai ritual khusus mengantarkan sang istri tercinta belanja ke pasar.

“Jadi, *weekend* itu memang saya berubah jadi supir istri saya sama anak saya. Kalau hari minggu teman-teman bisa lihat saya kadang-kadang ke pasar bareng istri. Itu kan *quality time* yang tidak membutuhkan waktu lama tetapi bisa dilakukan karena adanya kesempatan kan,” ceritanya.

Harapan

Robert memiliki kerinduan untuk terus mengambil peran berkontribusi kepada bangsa dan negara sekecil apapun. Ia merasa Republik Indonesia memiliki keunikan dan memperoleh banyak anugerah dari Tuhan.

“Harusnya kita semua cinta *banget* sama republik ini dan ingin membangun buat Republik ini. Kalau kita berada di luar negeri, misalnya saya kerja di luar negeri, itu kan kontribusi saya akan menjadi kecil saja untuk negara. Tapi kalau saya pulang ke Indonesia, banyak yang bisa kita lakukan,” ujarnya.

Bagi diri sendiri, ia memaknai hidup di dunia hanyalah sementara. Setiap perbuatan manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Hal itu pula yang menginspirasi Robert untuk terus memberi kontribusi kepada sekitarnya. Ia memiliki moto ‘*think without the box*’ yang berarti berpikir kreatif tanpa batas untuk Indonesia pada umumnya, dan bagi Kemenkeu pada khususnya.

“*Never stop learning*, yang paling penting harus menjadi manusia yang bermanfaat. Itu juga terpengaruh dari Bapak saya. Beliau pernah bilang ‘Ada ilmu kalau *nggak* bermanfaat bagi masyarakat juga akan kurang komplit hidup itu,’” kenang Robert.

Teks Abdul Aziz

FISKALISTA SEPAK BOLA

Wahyu Utomo,
Kabid Kebijakan Belanja Pusat dan
Pembiayaan, Pusat Kebijakan APBN, Badan
Kebijakan Fiskal, Kemenkeu

Sepak bola merupakan olah raga favorit yang menguras perhatian dunia. Magnet sepak bola memang mendunia. Sepak bola selalu menarik untuk disimak dengan sejuta pesona dan sensasinya. Pesona sepak bola ini begitu dahsyat dan mampu mngehadirkan kegembiraan bagi banyak orang.

Sepak bola bukan olahraga biasa. Sebab, ia tidak hanya mengandalkan ketangguhan fisik, tetapi juga memerlukan strategi jitu, serta kerjasama tim yang solid dan kompak. Kombinasi ketangguhan fisik, strategi permainan, dan soliditas *tim work* ini, bukan hanya melahirkan permainan yang indah, melainkan juga efektif untuk memenangkan pertandingan.

Pergerakan bola dari satu pemain ke pemain lainnya begitu terukur, menuju sebuah sasaran, sehingga pada gilirannya akan membuahkan sebuah gol pada gawang lawan. Ketepatan berbagi peran, sesuai dengan porsi masing-masing pemain menjadi kunci untuk meraih kemenangan. Berkaca pada konteks ini, permainan sepak bola memberi pembelajaran bagi kita, bahwa ketepatan strategi dan berbagi peran secara proporsional adalah kunci sukses

mencapai tujuan.

Hal ini juga berlaku pada pengelolaan fiskal. APBN sebagai instrumen utama dalam kebijakan fiskal harus dikelola secara cermat, tepat, dan proporsional, sehingga menciptakan keseimbangan makro. Hal ini pada gilirannya diharapkan mampu menggerakkan aktivitas ekonomi secara lebih optimal. Peran APBN lebih diarahkan untuk penyediaan barang dan kebutuhan dasar yang berorientasi perbaikan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan iklim investasi yang sehat dan kondusif, sehingga menjadi *trigger* bagi terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan (*growth with equity*).

Pada sisi lain, swasta juga diberi ruang untuk berperan dan ditumbuhkembangkan guna menggarap sektor privat. Sementara BUMN dan BLU diberdayakan dan disinergikan sebagai komplemen dan suplemen, sesuai perannya masing-masing. Namun di saat tertentu, BUMN dan BLU juga dijadikan *fiscal tool* guna ikut berperan sebagai *agent of development*.

Seluruh pelaku ekonomi didorong bergerak dan tumbuh berkembang sesuai porsinya, sehingga mekanisme pasar dapat berjalan, keseimbangan makro bisa



Foto Ilustrasi
Resha Aditya
Pratama

terjadi, hingga pada akhirnya tercipta efisiensi ekonomi. Melalui harmonisasi dan stabilitas ekonomi yang mantap, terwujud pula fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

APBN terus dijaga sesuai porsinya. Sebab bila terlalu dominan dan melebihi porsinya, APBN bisa mereduksi peran swasta dan BUMN, atau bahkan menimbulkan *over lapping* dalam memainkan perannya. Apabila hal ini berlangsung lama tanpa upaya koreksi, akan muncul fenomena publikisasi sektor *private*. Akibatnya, peran swasta akan melemah, BUMN limbung, dan BLU

tumpang tindih karena kontribusinya kurang. Hal ini mengancam keseimbangan makro, mengganggu stabilitas ekonomi, dan mendorong terjadinya aktivitas ekonomi yang tidak optimal. Sebab, tingkat ketergantungan terhadap APBN begitu tinggi, sedangkan ruang fiskal yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai. Hal ini akan mengancam keberlanjutan fiskal di masa mendatang.

Sebaliknya, apabila peran APBN sangat minor dan peluang yang diberikan pada sektor swasta, BUMN, dan BLU begitu besar, juga bukan langkah yang tepat. Sebab, akan mendorong

munculnya komersialisasi sektor publik. Akibatnya, hajat hidup orang banyak yang semestinya dilindungi, menjadi terabaikan. Tanpa disadari, hal ini akan memicu ketidakseimbangan makro karena barang publik dan layanan publik yang seyogyanya menjadi domain APBN, dalam memberi perlindungan bagi masyarakat, justru terabaikan. Dalam konteks ini, kita tidak boleh masuk dalam “dunia terbalik”, yaitu komersialisasi sektor publik dan publikisasi sektor *private*.

APBN bukan segala-galanya. Menggantungkan segala urusan hanya kepada APBN tidaklah tepat. Semua perlu

Secara konsepsi, pengelolaan APBN terlihat mudah. Namun dalam prakteknya, seringkali pengelola dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari aspek ekonomi, politik, maupun administratif.

dipilih dan dipilih, mana yang masuk kategori sektor publik, dan mana yang masuk sektor *private*. Mana yang menjadi domain dan memerlukan intervensi APBN secara langsung, mana yang hanya memerlukan peran APBN sebagai *trigger*, dan mana yang tidak perlu intervensi APBN secara langsung, tetapi dengan memberdayakan peran BUMN, BLU maupun swasta. Semua perlu diletakkan sesuai porsinya, agar keseimbangan makro terjadi dan efisiensi serta stabilisasi ekonomi terjaga.

Secara konsepsi, pengelolaan APBN terlihat mudah. Namun dalam prakteknya, seringkali pengelola dihadapkan pada beberapa tantangan, baik dari aspek ekonomi, politik, maupun administratif. Hal ini menjadi tantangan, sekaligus pembelajaran bagi kita semua, bahwa pengelolaan APBN mempunyai nilai strategis yang tetap harus dijaga sesuai porsinya.

Fungsi alokasi, stabilisasi, dan distribusi harus terus diperkuat dan dijalankan secara efektif, agar peran APBN bisa optimal, baik dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memelihara stabilitas perekonomian, dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dengan begitu, APBN akan memberi makna dan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat, serta bagi perekonomian nasional.

Hal ini telah menjadi komitmen Pemerintah. Untuk mewujudkan sebuah bangsa yang fondasi perekonomiannya kuat dan bertumbuh pada level yang cukup tinggi, maka sektor riilnya harus

bergerak, kesempatan kerja harus terbuka luas, stabilitas perekonomiannya harus mantap dan berkeadilan, serta kesenjangan ekonomi harus semakin menyempit.

Hal ini terefleksi dari perekonomian yang stabil dan kuat, harga-harga kebutuhan pokok yang terjangkau, kehidupan masyarakat yang semakin sejahtera, berkecukupan, tentram, dan damai. Hidup penuh kesyukuran dan keberkahan dalam balutan semangat persatuan dalam kebhinekaan. Cukup sandang, cukup pangan, cukup papan, fasilitas pendidikan dan kesehatan berkualitas, anak-anak bangsa bisa tersenyum ceria menatap masa depan dengan penuh optimisme. Para petani, nelayan dan para buruh dapat berkerja dengan tenang dan menikmati hasil kerja kerasnya dengan penuh suka cita dan rasa syukur yang dalam. Hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu menjadi panglima sebagai pengayom dan pelindung bagi seluruh masyarakat. Inilah gambaran sebuah bangsa yang kita perjuangkan bersama untuk mewujudkan sebuah negeri yang *gemah ripah loh jinawi, toto titi tentrem kerto raharjo*.

Namun kita semua perlu menyadari untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan komitmen yang kuat dan konsistensi. Sebab, tantangan ke depan akan semakin berat. Perekonomian global, walaupun menunjukkan tren membaik, masih dibayangi ketidakpastian. Perang dagang Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok, proteksionisme, persaingan yang semakin ketat, perkembangan teknologi yang semakin pesat, serta perubahan iklim. Begitupun perekonomian domestik yang menghadapi tekanan yang cukup besar, sehingga penguatan pengelolaan fiskal, terutama APBN, menjadi kunci yang tetap harus dijaga dan diperjuangkan, agar tetap berada pada jalur yang benar.

Menjadi tugas kita untuk menjaga agar APBN bergerak dan diletakkan sesuai porsinya. Seperti halnya sepak bola, ia perlu berbagi peran, sinergis, dan harmoni menuju satu tujuan. Dengan demikian, gol-gol kemenangan bisa dicapai, yaitu masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, adil, makmur, damai dan sejahtera.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik Tahun 2018

GlobalMarkets



Laboratorium Jadi Sumber Solusi

Adi Surya Pradipta begitu mencintai laboratorium serta semua kegiatan penelitian yang berlangsung di dalamnya. Lulusan magister Ilmu Teknik Material dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini memiliki impian, agar tiap penemuan yang diperoleh dari laboratorium, tidak berhenti pada jurnal akademik. Melainkan harus bisa berkontribusi nyata bagi masyarakat.

Adi, demikian dia disapa, merupakan *awardee* Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) angkatan Persiapan Keberangkatan (PK) ke-48. Dia berhasil menyelesaikan pendidikan magisternya pada 2014 dengan predikat *cumlaude*. Lulus dari ITB, Adi aktif dalam sejumlah kegiatan penelitian guna menghasilkan penemuan baru.

Geopori, sebuah inovasi material infrastruktur jalan, adalah salah satu penemuan yang dikerjakan Adi bersama dengan tim. Dengan kemampuan daya serapnya yang tinggi, geopori yang digunakan sebagai material pengganti semen dan beton pada jalan, bisa mencegah terjadinya genangan air dan solusi mencegah banjir. Tidak heran, geopori dianugerahi penghargaan untuk kategori Program Kerjasama Riset Kebutuhan Produk Iptek untuk Pembangunan Jawa Barat.

Pada perkembangannya, Geopori bermetamorfosis menjadi PT Bandung Geo Pori Solusi dimana Adi menjadi salah satu inventornya. Perusahaan ini memiliki

visi untuk mewujudkan masyarakat yang sadar lingkungan dengan penerapan teknologi mutakhir yang berkelanjutan. Beberapa hal yang ditawarkan meliputi jasa, produk, dan kerjasama terkait geopori.

Senang menemukan hal baru

Kecintaan Adi pada penelitian dan inovasi memang begitu tinggi. “Saya senang meng-*explore*, menciptakan sesuatu yang baru, dan melestarikan hal-hal yang baik dan mengembangkannya,” demikian tutur pria kelahiran Bandung 27 tahun silam ini.

Teknik material menjadi bidang ilmu yang dia minati, sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Dari bidang teknik material pula, Adi berkeinginan memulai penelitiannya. Utamanya, material lokal Indonesia.

“Saya mencoba untuk meng-*explore* ilmu dan pengetahuan saya terhadap material. Dengan begitu, saya harap bisa mengembangkan material-material yang harusnya bisa menjadi keunggulannya Indonesia karena berbasis pada material lokal Indonesia,” ungkapnya.

Adi berharap, nilai-nilai positif kehidupan di Indonesia bisa turut dilestarikan lewat penemuan melalui teknologi material tersebut. Selanjutnya, hal tersebut bisa memberikan sumbangsih dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Harapan ini selanjutnya memotivasi Adi untuk mendirikan perusahaan

pemula. “Saya kemudian merintis sebuah *Start-Up* (perusahaan pemula) *non-digital* di bidang teknologi material,” ungkap Adi.

Perusahaan tersebut Adi beri nama Tech Prom Lab. “Secara ucapan berarti *take from lab*, maksudnya mengambil (solusi) segala sesuatu dari laboratorium,” terang Adi. Lebih jauh dia menjelaskan, Perusahaan Tech Prom Lab berjalan dengan cara menginkubasi teknologi berbasis material yang sudah berada pada Tingkat Kesiapan Teknologi ke-6. Maksudnya, sudah memiliki prototipe produk aplikatif.

“Tahap berikutnya, dibutuhkan modifikasi dan optimasi *performance*, sehingga nantinya produk dapat dikembangkan ke tingkat industri skala pilot maupun *mass production*,” paparnya.

Meski tak jarang diasosiasikan dengan toko bangunan atau tukang material oleh kebanyakan masyarakat awam, keunikan bidang ilmu teknik material diyakini Adi memiliki potensi dan peluang besar ke depan. “Saya yakin bahwa ilmu ini merupakan dasar pengembangan teknologi masa depan. Industri yang maju dan masyarakat yang sejahtera diawali dari inovasi sumber daya material di negeri ini,” katanya usai menjalani seminar dan *short course* yang berhubungan dengan bidang ini.

Melanjutkan minat

Pascalulus dari pendidikan sarjana di ITB, Adi aktif menjadi asisten riset di Laboratorium Pemrosesan Material Maju



(Advanced Materials Processing Lab). Selain berkesempatan menyelesaikan penelitian tugas akhir sarjananya di sana, Adi tidak jarang mengerjakan sejumlah topik bersama dengan rekan-rekan anggota lab lain. Kebanyakan dari mereka memiliki latar belakang bidang ilmu yang berbeda-beda.

“Dari mulai Teknik Material, Teknik Fisika, Kimia, Biologi, hingga ke Kedokteran Gigi,” ungkapnya. Kondisi tersebut, diakui Adi cocok dengan pribadinya yang menyukai kolaborasi. “Khususnya dalam mengembangkan suatu material melalui pendekatan yang holistik, sehingga tidak sekadar mengandalkan pengetahuan individu,” katanya.

Berangkat dari kondisi tersebut, Adi memutuskan untuk melanjutkan bidang teknik material yang ditekuninya selama ini melalui beasiswa dalam negeri. Pilihannya kemudian jatuh pada LPDP karena sejauh ini Adi mendengar penilaian positif dari sejumlah *awardee* yang dia kenal.

Terdapat alasan kuat dibalik keputusan Adi untuk mengambil pendidikan beasiswa di dalam negeri. “Ada visi yang ingin saya buktikan. Bahwa jika seseorang mendapat amanah beasiswa dari rakyat Indonesia, akan lebih baik jika seluruh dana yang dianggarkan dapat diserap optimal bagi kemaslahatan rakyat Indonesia,” jelasnya.



Adi menerima penghargaan dari Menteri Keuangan sebagai 2nd Winner Entrepreneur Summit – Welcoming Alumni LPDP 2018.

Foto dok. pribadi.

Dia melanjutkan, “Ketika studi pascasarjana dilangsungkan di dalam negeri, kampus akan mendapat peningkatan akreditasi dan pengembangan kualitas pendidikan. Selain itu, penelitian (thesis) yang dikerjakan bisa dimiliki oleh kampus dalam negeri,”ujarnya.

Saat menjalankan seleksi, Adi perlu lima kali bolak balik untuk berbincang dengan *interviewer*. “Setiap kali saya duduk kembali di kursi peserta seleksi, saya ditanyai pertanyaan yang berbeda. Namun sepertinya, hal yang ingin dipastikan oleh para penguji adalah ‘kapan saya akan mulai studi,’” kisahnyanya. Menurut Adi, hal ini berkenaan dengan aturan baru LPDP terkait waktu perkuliahan yang bisa dilaksanakan paling cepat enam bulan setelah proses wawancara selesai.

Semakin berdaya

Dua bulan menjalankan pendidikan magisternya, Adi langsung terlibat di dalam komunitas di Bandung. Dia diamanahi sebagai koordinator *awardee* LPDP se-Bandung Raya (BARAYA). Komunitas ini terdiri dari 500 anggota yang merupakan *awardee* aktif. Mereka merupakan mahasiswa magister di tiga kampus berskala nasional, yaitu ITB, UNPAD, dan UPI.

Kegiatan BARAYA umumnya bersifat sosial akademik, seperti *roadshow* LPDP

Baraya. Meski demikian, terdapat juga kegiatan yang bersifat kekeluargaan, seperti Baraya Bahagia, serta bersifat sosial melalui kunjungan ke sejumlah panti sosial.

Adi mengaku bersyukur memperoleh beasiswa LPDP. “Sejak awal kami diberitahukan besaran dana yang akan diperoleh hingga denda yang akan diterima, sehingga kami melakukan tanda tangan kontrak dengan jelas,”akunya. Tidak hanya itu, LPDP juga memberi perbekalan memadai sebelum seorang *awardee* menjalani masa perkuliahan. “Kami diberikan pelatihan kepemimpinan, persiapan keberangkatan sebagai bekal dalam menjalani studi,” ungkapnya.

Pada akhir kesempatan, Adi tidak lupa berpesan kepada para calon *awardee* untuk selalu memiliki tekad yang kuat. “Siapun yang ingin melanjutkan studi ke pendidikan tinggi, harus punya keinginan yang kuat. Jangan berpikir tidak melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya,” pesannya. Dia melanjutkan, “Tanggung jawab mereka yang berpendidikan tinggi semakin besar dan berat, sehingga jangan lupakan peran kita untuk masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutupnya.

Teks Farida Rosadi

Cetak Biru Kerja Sama Bilateral

Teks Deasi Widya, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

Sebagai pengelola keuangan negara yang memiliki visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, Kementerian Keuangan tidak hanya menghadapi tantangan seputar besarnya pendapatan untuk membiayai pengeluaran negara, namun juga masifnya disrupsi teknologi global, serta dinamika ekonomi politik dunia.

Perubahan kebijakan situasional yang terjadi begitu cepat dalam tataran ekonomi dunia mau tidak mau harus direspon dengan cepat pula oleh Kementerian Keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah perlambatan pertumbuhan ekonomi dan risiko keuangan nasional.

Agar dapat menyikapi dinamika globalisasi dan persaingan ekonomi antar negara dengan bijak dan terarah, Kementerian Keuangan perlu mempererat kerja sama dengan warga dunia, baik institusi negara maupun organisasi internasional lainnya.

Dinamika geopolitik dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pendekatan melalui forum multilateral dirasa semakin kurang efektif. Beberapa negara kunci seperti Amerika Serikat dan

Inggris mulai kembali memaksimalkan pendekatan bilateral. Pilihan ini mengemuka karena kepentingan nasional lebih mudah diperjuangkan dengan kesepakatan antara dua negara, tanpa mempertimbangkan kepentingan pihak lain yang lebih kompleks.

Kementerian Keuangan pun secara cermat menangkap kecenderungan perubahan pendekatan kerja sama ini. Meski tidak serta merta meninggalkan forum multilateral, Kementerian Keuangan semakin serius mengoptimalkan kerja sama bilateral. Oleh sebab itu, strategi hubungan bilateral yang menunjukkan kejelasan arah, prioritas, dan target kerja sama dengan negara mitra menjadi penting untuk dimiliki.

2018 merupakan tahun bersejarah bagi Kementerian Keuangan karena telah berhasil menerbitkan Cetak Biru Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Bilateral. Dokumen yang disusun Badan Kebijakan Fiskal tersebut menjadi panduan utama untuk melakukan kerja sama bilateral, sesuai prioritas dan target capaian secara efektif dan terarah dalam lima hingga 10 tahun mendatang.

Secara umum, cetak biru kerja sama bilateral berisi dua hal utama. Pertama,

evaluasi efektivitas kerja sama yang sudah dan sedang dilakukan. Kedua, peta jalan untuk memastikan kerja sama bilateral di masa mendatang lebih efektif dan selaras dengan agenda nasional.

Cetak Biru tersebut menggunakan empat pilar kebijakan keuangan negara, yaitu: (i) peningkatan pendapatan yang berkualitas, (ii) pengelolaan pembiayaan yang *prudent*, (iii) belanja yang produktif dan berkualitas, serta (iv) usaha menjaga stabilitas ekonomi makro.

Dalam kaitan tersebut, kerja sama bilateral yang dilakukan Kementerian Keuangan selama ini dinilai telah mendorong stabilitas ekonomi di kawasan maupun global. Dengan demikian, peran Indonesia, secara lebih luas, semakin diakui dalam pergaulan internasional.

Selain itu, berbagai perjanjian bilateral juga dinilai mampu mendorong peningkatan pendapatan negara, khususnya yang terkait optimalisasi sektor penerimaan pajak dan bea masuk. Negosiasi bilateral juga dinilai efektif dalam upaya kerja sama promosi perdagangan dan investasi.

Meski telah banyak memberi kontribusi positif, kerja sama bilateral masih perlu dimaksimalkan, terutama



Ilustrasi
Dimach Putra

untuk meningkatkan kualitas pemantauan ekonomi global serta kemampuan kapasitas individu maupun kelembagaan dalam negeri.

Dalam peta jalan cetak biru kerja sama bilateral, penguatan produktifitas, peningkatan daya saing ekonomi, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, serta optimalisasi kapasitas sumber daya akan menjadi agenda utama. Upaya-upaya tersebut sejalan dengan harapan negara-negara di dunia bagi perkenonomian nasionalnya, sebagai kontribusi penting dalam penguatan tata kelola ekonomi keuangan internasional.

Pelaksanaan peta jalan ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan, khususnya di Kementerian Keuangan. Memang rasanya dalam suatu kerjasama lebih mudah merespon mitra bilateral tanpa

menyusun serta menyampaikan agenda dan kepentingan apa yang ingin dicapai. Namun bila hal itu kembali dilakukan, kerja sama akan kembali menjadi tak terarah. Disamping itu, hasil capaiannya juga akan sulit diukur.

Satu hal penting dalam cetak biru ini adalah adanya klasifikasi negara-negara mitra, serta potensi kerja sama yang dapat dijajaki dengan negara tersebut. Ada lima unsur utama yang digunakan untuk menilai suatu negara mitra, yaitu kapasitas ekonomi, keterlibatan dalam hubungan internasional, kemampuan keuangan, kemampuan keamanan, dan penguasaan pengetahuan. Kelima elemen ekonomi-politik ini merupakan cerminan dari kekuatan suatu negara.

Kelima elemen di atas memiliki derajat pengaruh yang berbeda satu sama lain. Mempertimbangkan bahwa fokus dari cetak biru ini adalah kerja sama

ekonomi dan keuangan, maka elemen-elemen yang terkait dengan keduanya mendapatkan bobot yang lebih dibanding elemen-elemen yang lain.

Alhasil, saat ini Kementerian Keuangan dapat memetakan negara mana yang lebih strategis bagi Indonesia dalam konteks kerja sama ekonomi dan keuangan. Dengan modal pemetaan ini, kerja sama bilateral di masa mendatang seharusnya tidak lagi dilakukan secara sporadis, cenderung membuang energi dan waktu, namun tidak ada kejelasan target yang ingin diraih.

Pada akhirnya, konsistensi dan komitmen semua pihak untuk menjalankan strategi serta rencana aksi dalam cetak biru kerja sama bilateral menjadi faktor kunci keberhasilan Kementerian Keuangan, dalam mendorong kepentingan nasional di tingkat global. Semoga.

Pengajar Yang Tak Lelah Belajar

Bekerja di Kementerian Keuangan tidak selalu mengurus kebijakan keuangan negara. Ada jalur karier lain, menjadi widyaiswara contohnya. Peran para pengajar internal ini penting dalam pengembangan kompetensi seluruh pegawai.

Salah satu aset pengajar terbaik yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan adalah Dr. Mila Mumpuni S.E., M.Si. Perempuan yang akrab dipanggil Mila ini sehari-hari mengabdikan diri di unit penempatannya di Balai Diklat Kepemimpinan Magelang. Pengalaman perempuan kelahiran Wonosobo ini sebagai widyaiswara telah terbentuk selama 13 tahun ia menjalani peran tersebut. Saat ini ia telah menyanggah gelar widyaiswara ahli madya.

Jabatan yang ia pegang tersebut bukan serta-merta diperolehnya karena masa pengabdian yang telah ia jalani. Itu juga didapatnya karena prestasi yang ia torehkan selama menjadi widyaiswara. Meski demikian, dirinya tak pernah merasa jumawa namun tetap memilih bersahaja dan apa adanya.

Menjalani takdir

Mila menuturkan bahwa posisi yang dia pegang saat ini tidak pernah ada dalam angannya sebelumnya. Jangankan menjadi abdi negara, berkuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang membuka langkahnya bekerja di Kementerian Keuangan tak ada dalam rencananya. Pilihannya mendaftar seleksi masuk STAN pun bisa dibilang hanya sebuah ketidaksengajaan yang membuka jalan takdirnya.

"Niatnya mengantar teman yang ingin daftar STAN, tapi jadinya ikut mendaftar Prodip III Anggaran. Itu pun diwanti-wanti teman saya agar tidak memilih program yang sama dengan dia!" kenangannya. Ternyata pilihan yang tak terencana itu malah berbuah manis, ia diterima sebagai mahasiswa baru STAN angkatan tahun 1993. Layaknya sebuah kisah fiksi, teman yang diantaranya mendaftar malah tidak lolos.

Awalnya ia menganggap berkuliah di STAN adalah kesempatan untuk tidak membebani orangtuanya dengan biaya kuliah. "Tahun pertama saya nyaris D.O, IPK saya hanya 2,89.



Tahun ke-2 jadi titik balik menyadari memang ini jalan hidup yang harus saya jalani," ujar Mila. Namun, kisahnya tak berhenti di situ. Saat lulus, dia termasuk lulusan Anggaran yang dilimpahkan ke luar instansi Direktorat Jenderal Anggaran. Ia harus menerima Surat Keputusan Penempatan yang mengantarnya mengawali kariernya di BPLK (cikal bakal BPPK).

Saat memutuskan keluar dari jalur struktural dan mengambil jenjang karier sebagai widyaiswara pun juga karena alasan praktis saja. Menurutnya pilihan karier tersebut lebih bisa memberinya banyak ruang dan peluang. "Tahun 2005 setelah lulus UPKP VI (penyesuaian ijazah setara S2) kebetulan ada pendaftaran

Mila Mumpuni.

Mila Mumpuni saat menerima penghargaan Peringkat III Widyaiswara Terbaik Nasional dari Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Foto Dok. Pribadi



widyaiswara. Setelah mempertimbangkan, saya rasa pilihan ini bisa membuat karier saya akan jauh lebih berkembang. Puji Tuhan lulus!" ucapnya.

Menjadi yang berprestasi

Tak salah memang Mila memilih karier menjadi widyaiswara. Ia mengaku bisa belajar lebih banyak untuk pengembangan pengetahuan dan kompetensi dirinya. Meskipun mata pelajaran yang ia ampu tak jauh dari latar belakang pendidikannya di bidang anggaran. Bahasan mengenai perpajakan dan bendahara pengeluaran menjadi topik yang selalu membuatnya penasaran.

Tapi Mila tak hanya berpuas diri dengan ilmu yang selama ini ia kuasai. Saat mengambil pendidikan doctoral (S3) ia memutuskan mempelajari Pendidikan Teknologi dan Kejuruan. Dari disiplin ilmu tersebut ia mengaku banyak mendapat ilmu tentang kediklatan. "Penting sekali untuk saya memperkuat pondasi ilmu kediklatan yang bisa diterapkan di BPPK.

Keseriusan Mila dalam menjalankan tugas dan memenuhi capaian sasaran kerja, membuatnya ditunjuk Annie Said Basalamah (Kepala Pusdiklat Pengembangan SDM) untuk mengikuti seleksi widyaiswara terbaik. Seleksi yang mulanya dalam lingkup internal BPPK ternyata mengantarkan Mila terpilih mewakili

Kementerian Keuangan mengikuti lomba tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)

"Saya menyerahkan tulisan tentang *best practice* tentang *mini coaching* penulisan yang sudah menjadi *concern* saya dua tahun ke belakang serta artikel tematik mengenai kesiapan widyaiswara menghadapi *e-learning* terkait keberadaan Kemenkeu Learning Center (KLC)," beber wanita berkacamata ini. "Jujur saya minder, karena merasa bahan yang saya sajikan sangat sederhana. Hanya bisa pasrah saja!" lanjutnya mengenang momen membanggakan itu. Di luar ekspektasinya, ternyata materi yang dikumpulkan dan presentasi yang dilakukan memukau dewan juri. Ia pun diganjar dengan penghargaan Peringkat III Widyaiswara Terbaik Nasional.

Bekerja dengan tujuan mulia

"Bekerjalah semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan!" seru Mila saat ditanya mengenai nilai hidup yang ia pegang. Pesan dari almarhumah ibunda yang diucapkan saat dirinya lulus dari STAN itu begitu membekas di ingatannya dan diimplementasikan tak hanya ke pekerjaan saja tapi juga kehidupan sehari-hari. Berangkat dari semangat itu, Mila yakin bahwa pekerjaannya itu tidak hanya mendatangkan manfaat bagi orang-orang

yang mendapat ilmu darinya, tapi juga sebagai bentuk pengabdian bagi agama dan Tuhannya.

Wanita yang kini bermukim di Yogyakarta itu percaya bahwa peran seorang widyaiswara harusnya tak hanya bisa dirasakan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan saja, tapi juga untuk masyarakat luas. Ia juga menekankan bahwa peran pengajar tidak hanya berhenti di ruang kelas, namun tetap harus berlanjut setelahnya.

Meski sebagai pengajar, Mila tetap aktif memantaskan diri, belajar. Beruntung dia memiliki panutan tempatnya menimba ilmu, yaitu Bapak Budi Rahardjo dan Bapak Siswo Sujanto. Dua tokoh alumni IIK (cikal bakal STAN) ini dijadikannya tempat diskusi. Tak jarang proses pertukaran pikiran yang mendalam tersebut berujung debat. Tapi dari proses tersebut Mila mengaku selalu mendapat pemahaman baru dari topik yang dibincangkan.

Terakhir, wanita berusia 44 tahun ini juga menekankan pentingnya dukungan instansi untuk pengembangan kompetensi bagi para widyaiswara. Ilmu pengetahuan memang layaknya pedang bermata dua. Tapi Mila meyakini jika langkah tersebut diambil, malah akan memberi benefit bagi instansi. "Jangan jadikan kami seperti Antareja yang mengabdikan pada keluarga Pandawa, namun karena kesaktiannya terpaksa moksha (menghilang) daripada mati dibunuh Kresna demi keseimbangan Perang Baratayudha."

Teks Dimach Putra



Foto
Langgeng
Wahyu

Menjadi ibu, adalah pengalaman istimewa yang dirasakan seorang wanita. Melekat pula di dalamnya tanggung jawab yang begitu besar. Siap atau tidak siap, wanita kemudian menjelma menjadi seseorang yang diharapkan bisa menghadirkan kasih sayang dan kelembutan, di balik kekuatannya dalam merawat sang buah hati. Menjadi ibu adalah puncak karier perempuan yang sebenarnya. Sebab demikianlah fitrah wanita, melahirkan dan menyusui. Sekilas ia nampak sederhana. Namun faktanya, kedua hal tersebut membutuhkan pengorbanan, ketangguhan, serta harapan.

Tidak semua wanita merasakan dua tugas fitrah di atas, dan memang bukanlah tolok ukur satu-satunya untuk menilai seorang wanita dari statusnya menjadi ibu atau tidak. Karena bagaimanapun, menjadi wanita adalah sesuatu yang istimewa, terlebih dalam berbagi peran dengan kaum laki-laki, sehingga bisa selaras, saling melengkapi, dan menciptakan harmoni kehidupan yang indah.

Namun, pengorbanan dan ketangguhan wanita diuji berkali-kali lipat ketika ia menjalani peran gandanya, yakni ibu bekerja (*working mom*). Variabel-

variabel berfikirnya harus menjadi lebih luas dan lebih efisien. Ibu harus memiliki banyak tangan untuk bisa melaksanakan tugas-tugas kantor, sekaligus tugas kerumahtangga. Awalnya bisa jadi sulit untuk menyeimbangkan peran, tapi *supermom* adalah keyakinan, ia bukan sekadar tuntutan.

Untuk itu, diperlukan percaya diri yang memadai agar seorang ibu dapat menjalankan perannya. Jika ibu merasa patah arang, termakan dengan perasaan-perasaan bersalah atas justifikasi yang seringkali datang tak diundang, maka jiwanya bisa oleng.

Setiap ibu pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Namun, masing-masing ibu memiliki cara yang berbeda. Sebab kondisi dan kesempatan yang dialaminya pun pasti tidak sama.

Beruntung, pengarusutamaan *gender* di Kementerian Keuangan sangat diperhatikan. Meskipun lingkungannya bukan hanya *gender* perempuan, tetapi para aparatur sipil negara (ASN) wanita begitu dimudahkan dalam mengemban peran gandanya. Misalnya, tunjangan kinerja yang tetap diberikan meski ibu sedang cuti melahirkan, penyediaan sarana prasarana laktasi, *daycare* yang dekat dengan kantor, serta berbagai kemudahan lainnya yang

Super Mom: Bukan Tuntutan tapi Keyakinan

terus dibangun demi kenyamanan ibu bekerja. Pemahaman yang benar atas pengarusutamaan *gender* selalu digulirkan melalui Duta Transformasi Kelembagaan yang juga diperankan menjadi Duta Pengarusutamaan *gender*.

Diharapkan, kondisi kondusif ini menjadikan ibu bekerja menjadi lebih ringan langkahnya, lebih berseri wajahnya dan lebih maksimal menjalankan perannya. Namun hal ini tidak berarti menjadikan pegawai wanita manja dengan segala kemudahan hingga menurunkan kinerjanya. Para pegawai wanita juga harus berkarya selaras dengan para pekerja pria dengan tetap menjalankan peran fitrahnya. Sebab wanita itu istimewa, maka perannya istimewa dan perlu langkah istimewa untuk menjalaninya.

Selamat berkarya wahai para ibu bekerja. Semoga apa yang kita lakukan di ranah ini menjadi bagian dari cara kita mengisi pembangunan. Mari kita sama-sama menilai kembali niat kita dan menelisik kembali hati, apa yang sudah saya lakukan hingga kini dan bagaimana saya akan melangkah ke depan? Ingatlah selalu bahwa *you are the great mothers. You are the great women*.

Teks Nurhidayati



Bukti Film Anti-hero Yang Tetap Disukai!

Setelah beberapa tahun terakhir disuguhi film superhero yang begitu banyak diminati dan disukai, kini banyak perusahaan hiburan yang mulai memproduksi film anti-hero. Anti-hero dibuat untuk mengaburkan definisi baik bak pahlawan, atau kejam bak penjahat. Mereka bisa dibilang berada di wilayah yang netral, tidak baik namun juga tidak jahat. Dan kini giliran Sony Pictures yang menerbitkan film terbarunya, *Venom*, sebuah karakter *spin-off* dari *Spiderman*.

Di film *Venom*, makhluk *symbiote* ini hadir sebagai karakter yang kompleks. *Venom* memang jahat, namun dia juga bisa menghibur. Dia bisa bijak dan toleran. Dan dengan kecerdasan yang tinggi, di film ini *Venom* bukan lagi sebagai parasit yang merugikan, akan tetapi sebagai teman yang melindungi.

Meski pada peluncuran film ini dibanjiri *review* dan *rating* yang rendah oleh beberapa *website*, namun tidak melunturkan rasa penasaran para penonton khususnya pecinta Marvel untuk menikmati betapa serunya perjalanan si makhluk parasit yang beradaptasi dengan tubuh Eddie Brock (*Tom Hardy*) ini. Terbukti setelah dua minggu peluncuran film, *Venom* masih bertahan di puncak film *box office*.

Walaupun *Venom* nampak kesulitan membuat tensi tinggi di awal film, namun semua itu akan tertolong ketika momen *symbiote* mulai muncul. Lebih lagi akting *Tom Hardy* yang memang sangat memukau dan tak perlu diragukan lagi. *Hardy* bermain secara profesional. Ia tidak menghilangkan karakter khas bawaannya tapi tetap tampil dengan penampilan yang baru. Harus diakui, ia menyelamatkan film ini secara keseluruhan. Apalagi saat harus bereksresi kesakitan, kaget, hingga tersipu-sipu, semuanya berjalan natural dan tidak jarang membuat para penonton merasa *geregetan*.

Anne Weying (*Michelle Williams*), tak hanya hadir sebagai *love interest* atau *partner* tokoh utama saja, tapi mempunyai peran lebih dari itu. Bahkan, ia juga sempat menjadi inang dari *Venom*. *Dr. Dora Skirth* (*Jenny State*) dan *Dr. Drake* (*Riz Ahmed*) pun tak mau kalah memberikan akting terbaiknya sehingga dapat menampilkan paduan permainan peran yang natural.

Venom memberikan alur cerita yang sangat lambat, teknik pengambilan gambar dan CGI yang dinilai masih sangat kurang untuk seukuran film *box office* yang paling ditunggu di tahun ini. Terbukti *Tom Hardy* pun juga mengungkapkan bahwa *scene* terbaiknya harus dipotong dan tak dimuat. Namun dibalik itu semua, *Venom* tetap menyajikan film yang menghibur. *Surprisingly fun!* Apalagi didukung oleh dua *post credit scene* yang siap mengesankan semua penikmat film anti-hero.

Jujur saja, meskipun *Venom* adalah film anti-hero, namun film ini dikemas dengan cukup berbeda. Dibalut sisi komedi dan cerita romantis, membuat *Venom* tetap menjadi film anti-hero yang seru untuk dinikmati di akhir pekan.

Ika Lutfi Alzuhri

Judul: *Venom*

Durasi: 112 menit

Director: Ruben Fleischer

Starring: *Tom Hardy*, *Michelle Williams*, *Jenny State*, *Riz Ahmed*

Tahun: 2018

Gambar:

<https://wegotthiscovered.com/>

Rela Antre, Demi Semangkuk Soto



Bogor, kota kecil yang menawarkan kesejukan udara dan kuliner yang beraneka ragam, sangat memanjakan warganya, pula warga luar kota untuk berlama-lama tinggal.

Berbagai sajian sedap makanan khas kota Bogor menjadikannya dirindukan untuk dikunjungi kembali, sebut saja toge goreng, soto kuning, roti unyil, dan banyak lagi makanan lain yang perlu masuk daftar sambangan saat wisata kuliner di kota Bogor.

Malam ini udara Bogor terasa dingin, menyantap semangkuk hangat soto kuning merupakan pilihan yang tepat. Kebetulan saat itu, saya melihat antrean pembeli cukup panjang di salah satu kedai soto. Timbul rasa penasaran di benak saya, apa sih keistimewaan semangkuk soto yang disajikan kedai tersebut? Tanpa pikir panjang, saya langsung memarkirkan mobil di salah satu sisi jalan kawasan kuliner legendaris kota Bogor dan bergegas menuju antrean yang sudah mengular.

Berbicara tentang soto kuning, salah satu sajian khas kota Bogor, terdapat sebuah kedai sederhana yang menyajikan soto kuning dengan rasa nikmat dan pas

di lidah para penikmat soto. Kedai soto kuning Pak Salam, salah satu legenda kuliner khas Bogor, terletak di Jalan Siliwangi, tepatnya di seberang Bank Mandiri Sukasari. Kedai tersebut mulai buka jam 4 sore sampai malam hari, namun biasanya tidak sampai hitungan waktu dua jam, dagangannya sudah laris terjual.

Antrian tampak selalu memenuhi kedai sederhana tersebut, apalagi di saat akhir pekan dimana banyak orang dari luar kota yang juga ingin turut mencicipi salah satu legenda kuliner khas Bogor ini. Para penikmat soto Pak Salam pun akan rela mengantrre panjang demi mencicipi kuah segar soto kuning khas Pak Salam. Di kedai soto pak Salam, kita bisa memilih isian soto



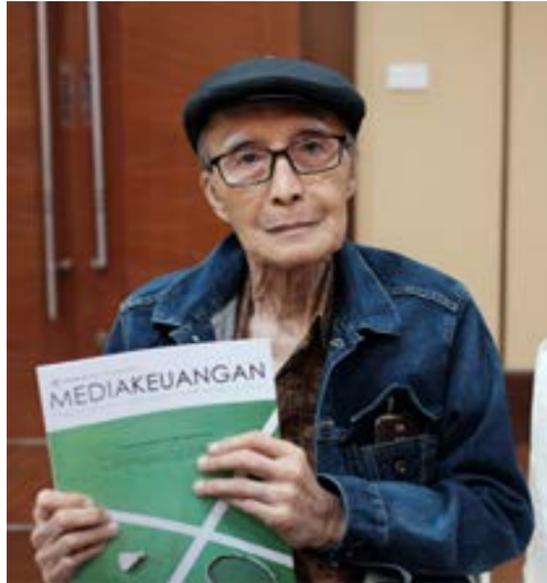
Suasana di Kedai soto kuning Pak Salam.

yang cukup variatif mulai dari daging, kikil, paru, babat, lidah dan jeroan sapi lainnya yang sangat menggugah selera. Biasanya satu porsi soto berisi minimal dua potong daging atau jeroan, harga per potong sebesar 8 ribu Rupiah.

Pembeli yang telah memilih daging atau jeroan, menunggu daging atau jeroan dipotong kecil-kecil dalam satu mangkuk kemudian disirami kuah soto hangat dari panci panas. Saat mencicipi suapan pertama kuah soto ini, sangat luar biasa. Kuahnya yang hangat dan aroma kunyit yang menjadi ciri khas soto kuning ini menjadi salah satu pemikat para pecinta soto untuk selalu datang ke kedai soto Pak Salam. Walaupun kuah soto kuning didominasi santan, namun terasa ringan/light dan tidak meninggalkan lemak saat disantap. Kuahnya yang gurih selalu dapat memanjakan indera pengecap kita, terlebih karena nge-blend dengan irisan daging/jeroan yang rasanya gurih dan tidak bau amis, cukup tambahkan sedikit sambal dan kecap manis, maka terciptalah sajian soto yang istimewa. Kehangatan kuah soto sangat cocok apabila dipadankan dengan sepiring nasi hangat yang ditaburi bawang goreng. Alhamdulillah selain rasa lapar yang terpenuhi, juga ada kenikmatan lain yang dirasakan.

Selain menyajikan semangkuk soto kuning yang penuh keistimewaan, ada beberapa keunikan yang seringkali dilontarkan oleh penjual. Untuk meminta pembeli memilih isian sotonya penjual akan melontarkan istilah "disetel", untuk pelanggan yang meminta tambahan nasi ada istilah "semangat", istilah "monitor" menandakan pesanan kita sudah dicatat harganya, dan "selamat" diucapkan sebagai kata terima kasih saat kita selesai membayar. Tentunya lontaran-lontaran istilah tersebut, menjadikan Soto Kuning Pak Salam tidak hanya hadir di lidah, namun juga di hati dan benak para pelanggannya.

Teks dan foto Etty Nur Baeti, Pegawai Biro Organta



Sapardi Djoko Damono

Membaca Untuk Sastra

merupakan tantangan tersendiri baginya. Tak ada satu pun hasil karya yang menjadi kesukaannya kecuali menulis.

Selain menulis sastra, ia juga menyukai puisi. Kemampuan menulisnya pun semakin terasah dengan perkembangan yang terlihat jelas dalam puisinya. Ia pun mengembangkan kariernya sebagai sastrawan. Ia juga sering menghadiri berbagai pertemuan internasional yang membawanya dalam memperoleh berbagai macam penghargaan.

Ditanya siapa sosok sastrawan yang menginspirasi, Sapardi menyebut W.S. Rendra sebagai sosok yang ia hormati dan kagumi. "Saya itu memuja Rendra luar biasa, bukan karena Rendra menulis yang rumit-rumit. Justru karena bahasanya sangat amat sederhana dan mudah kita telan, Rendra itu mengagumkan saya," paparnya.

Ia juga menjelaskan pentingnya membuat cerita menarik pada bagian pertama buku. Sembari membagikan tips menulis, ia mengemukakan seorang penulis dikatakan berhasil kalau ia berhasil menarik pembaca dalam lima sampai sepuluh halaman pertama.

Selain itu, penulis yang sukses adalah yang berhasil membuat tulisan yang bisa dimaknai beragam oleh para pembacanya. Dengan begitu, cerita yang ia sampaikan bisa berbeda antara satu pembaca dengan pembaca lainnya, sehingga tidak ada penafsiran dari pembaca yang salah atas karya sastranya.

"Multitafsir justru ciri ketinggian suatu karya sastra. Semakin banyak ditafsirkan berbagai macam, semakin kuat dan lama cerita itu bertahan. Kalau sekali dibaca, itu namanya koran," ungkapnya.

Teks Abdul Aziz

Sebuah kata bukanlah hanya 'sebuah' bagi dirinya, namun sudah menjadi teman dalam dirinya.

alah Sapardi Djoko Damono, yang terkenal sebagai sosok penyair. Di samping itu, ia juga terkenal sebagai seorang dosen, pakar sastra, kritikus sastra dan juga pengamat sastra. Lelaki kelahiran tahun 1940 yang kini usianya beranjak 78 tahun itu, memang tak muda lagi. Namun, hal itu tak berarti ia harus berhenti membuat karya.

Baginya tak ada kesulitan untuk membuat rangkaian kata menjadi sebuah kalimat dan paragraf. "Bukan karena ada ilham atau wahyu dari atas tapi kalau saya ingin menulis, ya saya menulis tapi kalau saya tidak ingin menulis ya tidak. Seseorang bisa menulis karena membaca, juga seseorang bisa berbicara karena mendengar, seperti saya ini," ungkapnya.

Ditanya tentang bagaimana proses kreatif yang akhirnya bisa menghasilkan karya-karyanya itu, Sapardi menuturkan bahwa setiap orang bisa menciptakan sesuatu dengan apapun yang ia suka. Jadi, semua orang itu 'creator' yang berguna untuk diri sendiri atau berguna bagi orang banyak.

"Kalau dari pengalaman saya, kreatif itu ya dari menulis. Sejak SMP saya suka membaca kemudian menulis, semakin banyak saudara menulis semakin bisa, semakin saudara banyak membaca semakin gampang saudara untuk menulis," paparnya.

Ia berharap dapat terus membuat karya yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Hal tersebut

Sapardi Djoko Damono

Foto Resha Aditya Pratama

Mas Praim

"NGGAK CONNECT"

Cerita : Pramudya A. W.

Gambar : Bimo Adi





HARI AYAH NASIONAL
12 NOVEMBER 2018

Foto
Dianita. S



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA